

**EVALUASI PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR MIMBAAN  
BARU UNTUK MENINGKATKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
TAHUN 2016-2017**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)  
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dengan Minat Utama Inovasi Pemerintahan

Oleh :

Bagus Setyo Nugroho

NIM 145120607111008



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**EVALUASI PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR MIMBAAN  
BARU UNTUK MENINGKATKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
TAHUN 2016-2017**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh ;**

**Bagus Setyo Nugroho**

**NIM 145120607111008**

**Telah Disetujui Oleh Pembimbing**

**Pembimbing Utama**

**Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev**  
**NIK. 2014058609212001**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**EVALUASI PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR MIMBAAN**  
**BARU UNTUK MENINGKATKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**  
**TAHUN 2016-2017**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**  
**Bagus Setyo Nugroho**  
**145120607111008**

**Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana Ilmu Pemerintahan**  
**Pada tanggal 11 Desember 2018**

**Tim Penguji**

**Ketua Majelis Penguji**

**Sekretaris Majelis Penguji**

**Andi Setiawan, S.IP., M.Si**  
**NIK. 2013048708211001**

**Bargah Pratama, S.AP., M.AP**  
**NIK. 2018078707281001**

**Anggota Majelis Penguji**

**Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev**  
**NIK. 2014058609212001**

**Malang, 11 Desember 2018**  
**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Prof.Dr. Unti Ludigdo., SE., M.Si, Ak**  
**NIP.196908141994021001**

**LEMBAR PERNYATAAN**

Nama : Bagus Setyo Nugroho

NIM : 145120607111008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Evaluasi Penataan dan Pengelolaan Pasar Mimbaan Baru Untuk Meningkatkan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2016-2017” adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi tersebut telah diberi tanda citasi serta ditunjukkan dalam lembar Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 11 Desember 2018  
Yang Memberi Pernyataan,

Bagus Setyo Nugroho  
145120607111008



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas rahmat dan nikmat yang Allah SWT berikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Penataan dan Pengelolaan Pasar Mimbaan Baru Untuk Meningkatkan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2016-2017”. Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan menempuh gelar Strata (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Skripsi ini merupakan sebuah karya yang tidak sempurna, maka dari itu selama proses penyelesaian peneliti telah banyak mendapat masukan. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat, kekuatan serta ridho-Nya kepada penulis, sehingga peneliti dapat melalui proses pengerjaan skripsi sampai dengan selesai.
2. Kedua orang yang sangat saya sayangi, Ibu dan Ayah. Siti Herawati dan Sentot Dwiriyanto. Terimakasih telah mendidik dan membesarkan saya, Terimakasih untuk doa dan dukungan secara moril maupun materil. Terimakasih untuk segala yang engkau berikan sehingga saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bertanggung jawab. Semoga dengan ini saya bisa membanggakan kalian berdua.
3. Saudari-saudari saya, Rininta Dianawati dan Hardini Irnayanti. Terimakasih telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan dan doa-doanya sekaligus memberikan motivasi kepada saya.

4. Untuk Imani Angya Kirana, terima kasih banyak untuk dukungan dan doanya selama saya menempuh kuliah dan mengerjakan skripsi. Terima kasih untuk selalu ada untuk saya dan selalu memberikan semangat untuk saya.
5. Ibu Ratnaningsih Damayanti, S.IP, M.Ec.Dev selaku dosen pembimbing skripsi saya. Beliau adalah dosen yang sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih kepada ibu yang sudah sabar dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi saya untuk selalu berusaha lebih baik lagi.
6. Bapak Andi Setiawan., S.IP., M.Si dan Pak Barqah Pratama, S.AP.,M.AP. selaku majelis penguji skripsi saya. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi saya dan memberikan saran, masukan dan pertanyaan yang membangun dan membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi. .
7. Kepala Program Studi dan Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah mengajarkan ilmu yang sangat berarti bagi saya, selama berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
8. Untuk Teman-teman geng koplak, Indra, Reza, Damar, Kemal, Dwiky, Haekal, Nanang, Yoko serta Satya yang selalu memberikan dukungan dan semangat ketika sebelum, ketika, dan setelah skripsi. Dan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada kalian semua yang sudah empat tahun lebih ini menjadi manusia-manusia pelipur lara baik dari omongan yang menyakitkan maupun dari candaan receh yang tujuannya untuk menghibur

kita semua di kala suka dan duka. Terimakasih waktunya, kalian semua bener-bener koplak dan tak akan dilupa !

9. Untuk keluarga besar AIS Malang, terima kasih banyak untuk dukungan dan doanya sehingga membuat saya selalu semangat untuk mengerjakan skripsi saya. .
10. Teman-teman Ilmu pemerintahan angkatan 2014 Kelas A Terimakasih sudah banyak membantu dan mendukung selama perkuliahan..
11. Kepada Informan saya selama melakukan penelitian, terimakasih sudah mau memberikan informasi yang menunjang skripsi saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan manfaat dalam memberikan kontribusi pada perkembangan terkait Evaluasi Kebijakan Publik..

Malang, 11 Desember 2018

Penulis

Bagus Setyo Nugro

## ABSTRAK

**Bagus Setyo Nugroho, 2018, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Evaluasi Penataan dan Pengelolaan Pasar Mimbaan Baru Untuk Meningkatkan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2016-2017, Tim Pembimbing : Ratnaningsih Damayanti, S.IP.,M.Ec.Dev**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program penataan dan pengelolaan yang ada di Pasar Mimbaan Baru yang dilakukan untuk meningkatkan retribusi pelayanan pasar di tahun 2016-2017. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan milik yang dikemukakan oleh Edward A Suchman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016, tidak dilakukan penataan apa-apa di Pasar Mimbaan Baru oleh dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo (Disperindag). Padahal jika dilihat secara wilayah maka luas Pasar Mimbaan baru lebih luas dan letaknya yang ditengah kota yang bisa menjadi tempat tujuan para wisatawan untuk berbelanja oleh-oleh. Penataan baru dilakukan tahun 2017 yaitu membangun atap kanopi di bagian tengah pasar Untuk pengelolaan sendiri yang dilakukan oleh Disperindag adalah menarik iuran retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang di Pasar Mimbaan Baru. Penarikan retribusi mengalami kendala karena banyaknya pedagang yang tutup sejak tahun 2014-2017 karena sepi pembeli dan mahal retribusi. Penataan yang dilakukan tahun 2017 tidak membawa perubahan jumlah pembeli yang jumlahnya tetap. Para pembeli yang datang memang sudah berlangganan berbelanja disana sehingga tidak terpengaruh dengan pembangunan atap kanopi dan pendapatan yang diperoleh oleh pedagang tidak mengalami kenaikan.

**Kata Kunci : Pasar Mimbaan Baru, Penataan dan Pengelolaan, Evaluasi Kebijakan, Retribusi Pelayanan Pasar, Kabupaten Situbondo**

**ABSTRACT**

***Bagus Setyo Nugroho, 2018, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University, Evaluation of Mimbaan Baru Market Arrangement and Management to Increase Market Service Retribution for 2016-2017, Advisory Team: Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev***

---

*This study aims to evaluate the structuring and management programs that exist in the Mimbaan Baru Market that are conducted to increase market service retribution in 2016-2017. This study uses the theory of property policy evaluation proposed by Edward A Suchman. The research method used is descriptive qualitative research method. The results of this study show that in 2016, there was no arrangement in the Mimbaan Baru Market by related agencies, namely the Department of Industry and Trade of Situbondo District (Disperindag). Even if viewed in the area, the Mimbaan Baru Market area is wider and is located in the middle of the city which can be a destination for tourists to shop for souvenirs. The new arrangement was carried out in 2017, namely to build a canopy roof in the middle of the market. For self-management carried out by the Disperindag, the market service fees were collected to traders in Mimbaan Baru Market Withdrawal of fees is a problem because of the large number of traders that have been closed since 2014-2017 due to the lack of buyers and high fees. Arrangements made in 2017 do not bring about changes in the number of buyers whose numbers are fixed. The buyers who came were already subscribed to shopping there so they were not affected by the construction of a canopy roof and the income earned by traders did not increase*

***Keywords : Mimbaan Baru Market, Arrangement and Management, Policy Evaluation, Market Service Retribution, Situbondo District***



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR BAGAN .....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR ISTILAH .....	xvi
BAB I.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2 Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3 Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4 Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4.1 Manfaat Akademis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4.2 Manfaat Praktis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TINJAUAN PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 KerangkaTeoritik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1 Evaluasi Kebijakan Publik .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.2 Langkah Dalam Evaluasi Kebijakan Publik ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Alur Pikir.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
METODE PENELITIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

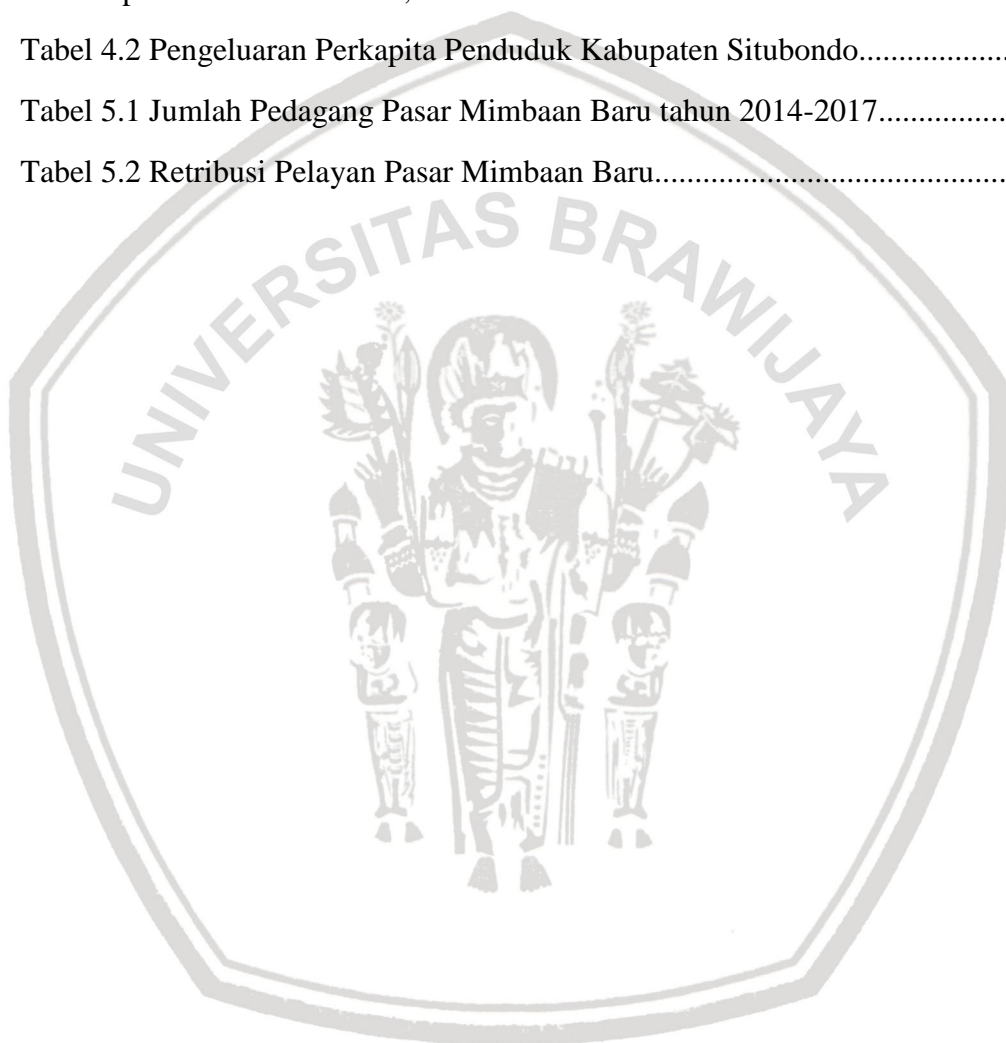


3.3 Jenis Data dan Sumber Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5 Teknik Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
GAMBARAN UMUM .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1 Gambaran Umum dan Kondisi Lokasi Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2 Kondisi Wilayah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.1 Data Demografi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.2 Pengeluaran Perkapita .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3 Pasar Di Kabupaten Situbondo .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ANALISIS EVALUASI PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR MIMBAAN BARU DI KABUPATEN SITUBONDO .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1 Langkah-langkah Dalam Melakukan Evaluasi Kebijakan Publik .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.1 Mengidentifikasi tujuan Penataan dan Pengelolaan Pasar Mimbaan Baru .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.2 Menganalisis Masalah Penataan dan Pengelolaan Pasar Mimbaan Baru .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.3 Mendeskripsikan dan Standarisasi Kegiatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.4 Mengukur Perubahan Jumlah Pembeli ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.5 Menentukan Penyebab Daya Beli Masyarakat di Pasar Mimbaan Baru .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.6 Menentukan Indikator Dampak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB VI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENUTUP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.1 Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.2 Rekomendasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LAMPIRAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo 2010,2015 dan 2016.....	48
Tabel 4.2 Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Situbondo.....	50
Tabel 5.1 Jumlah Pedagang Pasar Mimbaan Baru tahun 2014-2017.....	72
Tabel 5.2 Retribusi Pelayan Pasar Mimbaan Baru.....	75



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Situbondo .....	46
---	----



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pikir .....	32
Bagan 3.1 Model Analisis Data Interaktif Menurut Huberman dan Miles.....	41



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2017.....	8
--	---





## DAFTAR ISTILAH

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan rencana keuangan suatu daerah yang sebelumnya sudah disetujui bersama oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat
Disperindag	: Merupakan suatu instansi pemerintahan yang mengurus permasalahan industri dan perdagangan di suatu daerah
Evaluasi Kebijakan	: Suatu kegiatan yang di dalamnya berisi tentang penilain-penilain kebijakan yang sudah dilakukan mulai dari formulasi kebijakan sampai dengan implementasi kebijakan.
Fluktuatif	: Sebuah kondisi dimana sesuatu keadaanya tidak stabil atau tidak tetap dan selalu berubah-ubah setiap saat
Pasar	: Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan alat pertukaran yang sah yaitu uang
Penataan	: Berasal dari kata tata yang berarti menyusun atau merapikan sesuatu menjadi sesuatu yang tersusun dan terstruktur
Pengelolaan	: Suatu kegiatan dimana disitu terdapat kegiatan untuk memanfaatkan dan mengendalikan suatu sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu
Retribusi Daerah	: Pungutan yang ditarik oleh pemerintah daerah tertentu atas jasa dan pemerberian ijin tertentu untuk kepentingan pribadi atau badan
Retribusi Pelayanan Pasar	: Pungutan yang ditarik oleh pemerintah daerah kepada para pedagang yang berdagang di pasar tradisional atas pemberian ijin berjualan di pasar tersebut.
Toko Modern	: Toko dengan sistem pelayanan mandiri dan menjual barang secara eceran atau bisa juga dengan barang grosiran. Toko modern bisa berbentuk minimarket, supermarket, <i>departement store</i> atau <i>hypermart</i>

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**EVALUASI PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR MIMBAAN**  
**BARU UNTUK MENINGKATKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**  
**TAHUN 2016-2017**

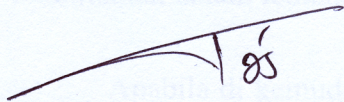
**SKRIPSI**

Disusun Oleh :  
**Bagus Setyo Nugroho**  
**145120607111008**

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian Sarjana Ilmu Pemerintahan  
Pada tanggal **11 Desember 2018**

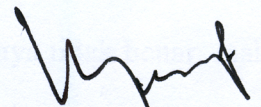
Tim Penguji

Ketua Majelis Penguji



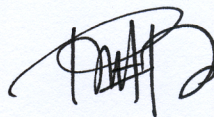
**Andi Setiawan, S.IP., M.Si**  
**NIK. 2013048708211001**

Sekretaris Majelis Penguji



**Barqah Pratama, S.AP., M.AP**  
**NIK. 2018078707281001**

Anggota Majelis Penguji




**Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev**  
**NIK. 2014058609212001**

**Malang, 11 Desember 2018**  
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Prof. Dr. Unti Lufigdo., SE., M.Si, Ak**   
**NIK. 196908141994021001**



**LEMBAR PERSETUJUAN**

**EVALUASI PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR MIMBAAN  
BARU UNTUK MENINGKATKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
TAHUN 2016-2017**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh ;**

**Bagus Setyo Nugroho**

**NIM 145120607111008**

**Telah Disetujui Oleh Pembimbing**

**Pembimbing Utama**



**Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev**  
**NIK. 2014058609212001**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Peristiwa Reformasi di Indonesia pada bulan Mei tahun 1998 merupakan suatu peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada bulan itu untuk pertama kalinya dalam 32 tahun masa kepemimpinannya, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden Republik Indonesia. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menjadi salah satu alasan banyaknya desakan dari masyarakat utamanya mahasiswa yang turun ke jalan menuntut turunnya Soeharto sebagai presiden pada saat itu. Setelah turunnya Soeharto, banyak sekali perubahan kebijakan yang dilakukan presiden setelahnya dalam berbagai bidang mulai dari kebebasan pers hingga pada pelimpahan kewenangan kepada daerah atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah.

Pada saat masih dipimpin oleh Soeharto, pemerintah pusat mengendalikan penuh atas wewenang untuk daerah. Semua kewenangan kedaerahan diurus oleh pusat atau lebih dikenal dengan sentralisasi. Setelah peristiwa reformasi tersebut, terjadi perubahan kebijakan dimana daerah memiliki kewenangannya sendiri untuk mengurus masalah rumah tangganya. Hal ini pertama kali diatur dalam Ketentuan MPR RI Nomor XV/MPR/1998, lalu setelah itu diubah menjadi Ketentuan MPR RI Nomor IV/MPR/2000. Setelah itu diubah lagi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004, dan terakhir peraturan tentang otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Ini merupakan aturan terbaru tentang

otonomi daerah dan menjadi acuan dalam pelaksanaan otonomi daerah hingga hari ini.

Otonomi daerah merupakan suatu kata yang sering kita dengar sekarang. Otonomi daerah baru ditetapkan setelah Soeharto mundur sebagai presiden karena semasa Soeharto menjabat, semua urusan daerah ditangani oleh pusat. Hal ini bisa berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif. Dampak positifnya adalah dengan bisa dilakukannya keseragaman dalam pembangunan di daerah karena semuanya mengacu pada pemerintah pusat. Akan tetapi sentralisasi ini juga dapat berdampak negatif dimana pemerintahan pusat bisa melakukan korupsi karena semua kewenangan daerah berada di tangan pemerintah pusat sehingga semua dana ada di pemerintah pusat. Untuk itu maka setelah reformasi dilakukanlah suatu upaya untuk mengurangi campur tangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Dalam undang-undang tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah daerah mempunyai hak, kewenangan serta kewajiban untuk mengurus sendiri masalah di daerahnya terkait dengan masyarakat yang ada di daerah tersebut yang masih dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu menurut Undang-Undang No 23

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diakses melalui <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>, pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 13.30 WIB



Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>2</sup>

Otonomi daerah mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 1998 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban pada daerah untuk mengurus sendiri permasalahan yang ada di daerah yang berkaitan dengan masyarakat tersebut. Pemerintah pusat sudah tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan pemerintah daerah tersebut. Akan tetapi bukan berarti pemerintah daerah sudah tidak menjalin hubungan dengan pemerintah pusat, dalam otonomi daerah ada beberapa kewenangan yang masih menjadi kewenangan pusat sehingga tidak sepenuhnya pemerintah daerah memiliki kewenangan mutlak untuk mengurus daerahnya karena masih ada beberapa kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Salah satu kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah adalah permasalahan ekonomi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur bagaimana kebijakan ekonomi daerah tersebut. Semua rencana pendapatan dan belanja daerah dapat diatur sendiri oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan bisa memaksimalkan pendapatan-pendapatan di daerah melalui semua sektor di

---

<sup>2</sup> *Ibid*



daerah tersebut yang bisa dijadikan potensi untuk menambah pendapatan ataupun pemasukan daerah.

Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mencari sendiri pendapatan di daerahnya dan mengolahnya untuk pembangunan yang nantinya manfaatnya harus bisa dirasakan oleh masyarakat di daerah itu sendiri. Saat ini pemerintah daerah bisa memanfaatkan berbagai sektor yang ada di daerah untuk mendapatkan pemasukan yang besar bagi daerahnya tersebut. Ini merupakan salah satu langkah yang bisa dianggap sebagai langkah yang positif karena saat ini pemerintah daerah sudah tidak perlu menunggu bantuan dari pemerintah pusat dalam mendapatkan pemasukan untuk pembangunan daerah tersebut, sekarang pemerintah daerah bisa secara mandiri mencari dan memanfaatkan semua sektor di daerahnya untuk dijadikan pendapatan asli daerah. Semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah maka semakin besar pula kesempatan daerah tersebut untuk melakukan pembangunan di daerahnya.

Akan tetapi dibalik sisi positif tersebut, tetap terdapat sisi negatif dari diadakannya otonomi daerah utamanya pada sektor ekonomi dan pembangunan di daerah. Dengan tidak adanya lagi campur tangan pemerintah pusat dalam menentukan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah bisa secara mandiri mencari pendapatan-pendapatan dari berbagai sektor untuk setelahnya digunakan untuk melakukan pembangunan di daerah tersebut. Itu bisa berlaku apabila di daerah tersebut terdapat banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, atau pemerintah suatu daerah dapat dengan jeli melihat suatu potensi yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai salah satu pemasukan daerah. Akan tetapi bila di daerah tersebut minim akan

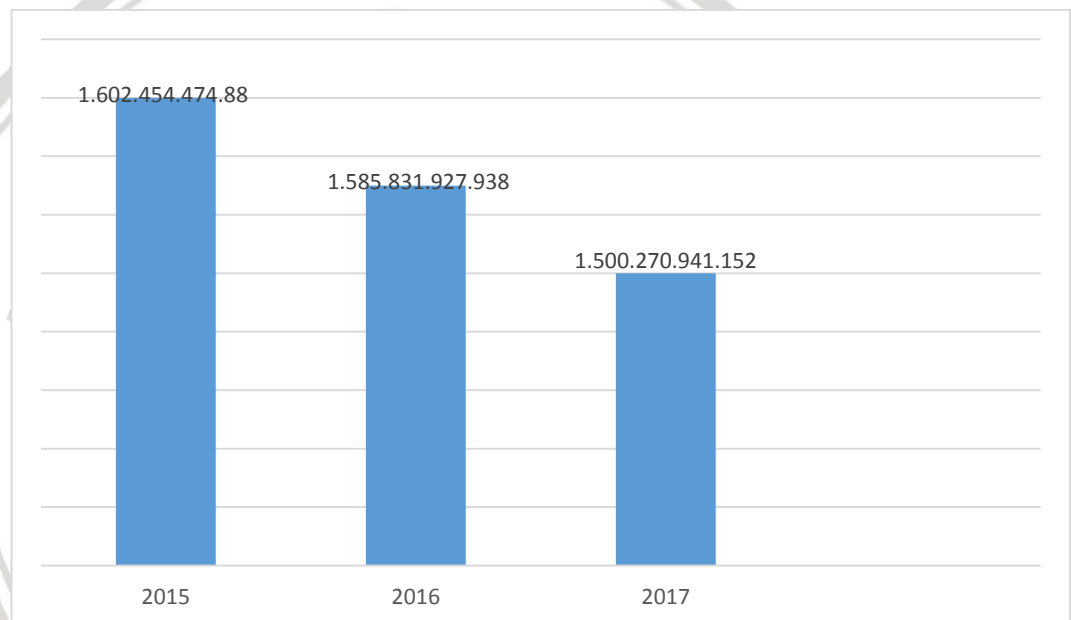
potensi dan pemerintah daerah di daerah tersebut tidak jeli dalam melihat potensi pemasukan daerah, maka daerah tersebut akan mendapatkan pemasukan yang sedikit dan pembangunan di daerah tersebut akan tersendat. Hal inilah yang mengakibatkan ketimpangan pembangunan di beberapa daerah.

Dibalik sisi positif dari otonomi daerah ternyata masih menyimpan suatu permasalahan yang menjadi sisi negatif dari otonomi daerah tersebut. Daerah yang tidak memiliki banyak potensi untuk dijadikan sebagai sumber pemasukan maka pendapatannya akan kecil dan pembangunan di daerah tersebut akan tersendat karena juga harus berbagi dengan anggaran-anggaran lain yang termasuk kedalam belanja daerah. Permasalahan ini saat ini banyak sekali terjadi di daerah-daerah sehingga semakin terlihat daerah yang pembangunannya maju dengan daerah yang pembangunannya masih tertinggal. Hal ini menimbulkan ketimpangan pembangunan yang ada di Indonesia. Masalah ini tidak hanya terjadi kepada daerah yang potensi-potensinya sedikit akan tetapi juga terjadi kepada daerah yang memiliki banyak potensi akan tetapi tidak dapat memaksimalkan potensi di daerah tersebut sehingga pendapatan yang diperoleh pun tergolong sedikit sehingga menyebabkan pengeluaran daerah lebih besar daripada pendapatan daerah atau biasa disebut dengan defisit.

Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami masalah dalam hal pendapatannya dalam anggarannya karena tidak maksimal dalam memanfaatkan potensi di daerahnya adalah Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo merupakan daerah yang terdapat di Provinsi Jawa Timur disebelah barat Kabupaten Banyuwangi. Dalam beberapa tahun terakhir, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo mengalami penurunan dalam hal pendapatannya. Hal ini tidak baik karena pemerintah daerah diharuskan untuk menekan anggaran belanja mereka termasuk anggaran pembangunan ataupun melakukan hutang karena pendapatan asli daerah tersebut masih kurang sehingga tidak menutupi anggaran belanja dari daerah tersebut.

**Grafik 1.1**  
**APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2017**



Sumber : Diolah oleh penulis 2018

Mengacu kepada APBD Kabupaten Situbondo tahun 2015-2017 tersebut, bisa dilihat bahwa pendapatan Kabupaten Situbondo terus mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2015, pendapatan yang diperoleh oleh Kabupaten Situbondo sejumlah satu triliun enam ratus miliar rupiah. Lalu pada tahun 2016, pendapatan Kabupaten Situbondo mengalami penurunan meskipun tidak terlalu drastis menjadi satu triliun lima

ratus delapan puluh lima miliar rupiah. Sementara itu pada tahun 2017, pendapatan Kabupaten Situbondo kembali mengalami penurunan yang cukup besar menjadi satu triliun limaratus miliar rupiah. Angka-angka pendapatan yang bisa dilihat terus mengalami penurunan tiap tahunnya yang dialami oleh Kabupaten Situbondo.

Angka yang terus mengalami penurunan ini mengakibatkan pembangunan yang ada di Kabupaten Situbondo menjadi sedikit terhambat karena anggaran belanja yang harus ditekan supaya defisit yang terjadi tidak semakin besar. Dampak lanjutan dari penurunan pendapatan yang terus menerus dialami oleh Kabupaten Situbondo selama beberapa tahun terakhir adalah masuknya Kabupaten Situbondo kedalam kategori daerah tertinggal di Indonesia. Hal ini sebenarnya bisa dilihat karena defisit tadi yang ada mengakibatkan pembangunan tidak berjalan dengan lancar dan mengakibatkan Kabupaten Situbondo masih termasuk dalam daerah tertinggal karena pembangunan yang tidak maksimal dan tidak menyeluruh. Ditetapkannya Kabupaten Situbondo sebagai daerah tertinggal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

Penetapan daerah tertinggal ini berdasarkan beberapa kriteria yang dilihat yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Bisa dilihat dalam kriteria tersebut ada poin kemampuan keuangan daerah dan sarana prasarana. Dengan penurunan pendapatan yang masih terjadi, Kabupaten Situbondo belum bisa keluar dari status daerah tertinggal tersebut karena kemampuan keuangan yang dialami oleh Kabupaten Situbondo masihlah belum memadai, bisa dilihat dari

jumlah penurunan pendapatan yang dialami setiap tahunnya. Selain itu akibat dari penurunan pendapatan itu juga mengakibatkan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak maksimal sehingga menyebabkan Kabupaten Situbondo ada dalam kriteria daerah tertinggal tersebut. Sesuatu hal yang mengkhawatirkan jika melihat kondisi geografis Kabupaten Situbondo yang berada di daerah strategis dan memiliki garis pantai yang cukup panjang.

Salah satu instrumen dari pendapatan asli daerah yaitu retribusi daerah.

Menurut Sugianto menyatakan bahwa :

Penerimaan pajak dan retribusi memberikan kontribusi yang cukup signifikan, yaitu hampir 70% terhadap anggaran pendapatan belanja negara bagi pemerintah dalam kurun waktu selama ini pajak dan retribusi menjadi primadona bagi kelanjutan pembangunan pemerintah Indonesia. Sebagai upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Sutedi, menyatakan bahwa :

Kewenangan dalam penetapan basis pajak serta penetapan jenis pajak dan retribusi masih dinilai rendah. Sebagaimana halnya kewenangan daerah dalam penetapan tarif pajak dan retribusi, dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tidak terlepas dari desentralisasi perpajakan mengingat pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan daerah. Sebagaimana pendapat Daflon bahwa : (1) setiap pemerintahan mempunyai kewenangan untuk mengenakan atau tidak mengenakan pajak dan berkemampuan untuk membiayai anggarannya secara independen ; (2) daerah secara otonom dapat menawarkan jenis pelayanan publik sehingga mempunyai akses langsung kepada masalah perpajakan

---

<sup>3</sup> Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2008, hlm 1



dan daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaannya karena memperhatikan aspirasi masyarakat daerahnya.<sup>4</sup>

Retribusi daerah merupakan suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu ataupun badan. Retribusi merupakan salah satu dari instrumen pendapatan asli daerah selain pajak daerah. Retribusi seharusnya dimaksimalkan sebaik mungkin untuk menambah pemasukan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, tidak cukup hanya mengandalkan pajak daerah ataupun dari dana-dana lainnya yang bukan dari pendapatan asli daerah. Retribusi yang bisa dimaksimalkan sebenarnya bisa berdampak baik karena uang dari retribusi itu sendiri bisa dipakai untuk melakukan pembangunan di daerah tersebut sehingga akhirnya masyarakat yang merasakan tidak rugi membayarkan retribusinya. Salah satu instrumen dari retribusi adalah retribusi pelayanan pasar. Retribusi ini sebenarnya berpeluang menjadi salah satu pemasukan yang besar bagi Kabupaten Situbondo mengingat banyaknya jumlah pasar yang ada disana. Akan tetapi retribusi pasar disini malah justru bermasalah.

Pasar merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dengan alat tukar yang sah. Pasar merupakan salah satu tempat yang bisa menjadi potensi untuk dijadikan pemasukan daerah karena disitu terjadi transaksi jual beli dan pemerintah daerah bisa menyediakan tempat yang nantinya pemerintah daerah bisa menyewakan tempat tersebut kepada para penjual ataupun para pedagang. Di Kabupaten Situbondo sendiri pasar jumlahnya

---

<sup>4</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 15



sangat banyak, dari wilayah paling timur sampai paling barat terdapat pasar, yang semuanya diisi oleh pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan pasar yang menjadi penyangga kegiatan ekonomi di Kabupaten Situbondo karena jumlahnya yang sangat banyak dan belum adanya pasar modern atau mall di Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo total memiliki 19 pasar tradisional yang terdapat di setiap daerah, dari barat sampai timur Kabupaten Situbondo. Pasar tradisional masih menjadi andalan bagi masyarakat di Kabupaten Situbondo untuk mencari barang dan keperluan sehari-hari. Dengan tidak atau belum adanya mall yang dibangun di Kabupaten Situbondo, membuat masyarakat masih mengandalkan pasar tradisional dan membuat pasar-pasar tradisional masih hidup hingga saat ini. Jumlah pasar tradisional yang cukup banyak membuat masyarakat merasakan kemudahan jika ingin berbelanja. Dari pasar dengan skala yang besar sampai ke pasar dengan skala yang kecil terdapat di Kabupaten Situbondo.

Hal ini merupakan suatu pertanda yang cukup baik karena masyarakat yang masih mengandalkan pasar tradisional untuk mencari kebutuhan sehari-hari membuat para pedagang bisa mencari nafkah dan membuat roda perekonomian di Kabupaten Situbondo tetap berjalan. Keuntungan ini juga dapat dirasakan oleh para pembeli karena dengan membeli di pasar tradisional mereka dapat memperkirakan harga barang yang akan mereka beli. Mereka bisa melakukan kegiatan tawar-menawar dengan para penjual yang hanya bisa dilakukan di pasar tradisional. Pasar yang ramai menandakan perekonomian di sebuah daerah tersebut tumbuh dengan sehat. Pasar-pasar tradisional yang terdapat di Kabupaten Situbondo inipun terdapat

bermacam-macam jenisnya, mulai dengan skala yang besar sampai dengan skala yang kecil.

Salah satu pasar tradisional yang berada di Kabupaten Situbondo adalah Pasar Mimbaan Baru. Pasar Mimbaan Baru didirikan pada tahun 1979 dan mulai beroperasi pada tahun tersebut. Jika dilihat dari skalanya maka Pasar Mimbaan Baru merupakan pasar terbesar yang ada di Kabupaten Situbondo saat ini. Pasar ini merupakan pasar tempat penjual menjual segala barang dagangannya, tidak terpaku pada satu barang dagangan saja yang berada di pasar tersebut. Pasar Mimbaan Baru terdapat di Jalan Jawa yang merupakan pusat kota Kabupaten Situbondo. Berada di tangan-tangan kota membuat Pasar Mimbaan Baru memiliki tempat yang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasar Mimbaan Baru merupakan pasar bertipe A yang ada di Kabupaten Situbondo. Pasar ini menjual berbagai macam keperluan yang ada yang dibutuhkan oleh para pembeli. Mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti daging dan sayuran, pasar ini juga menjual pakaian, jam tangan hingga peralatan rumah tangga. Lengkapnya pasar ini membuat Pasar Mimbaan Baru menjadi andalan bagi para masyarakat untuk mencari sesuatu yang mereka butuhkan. Selain itu pasar ini juga memiliki wilayah yang luas dan cukup besar, terdapat lantai dua untuk mengakomodasi banyaknya penjual yang berjualan di pasar tersebut. Segala kebutuhan bisa dicari di pasar tersebut.

Akan tetapi meskipun merupakan pasar dengan skala terbesar di Kabupaten Situbondo, Pasar Mimbaan Baru memiliki sejumlah masalah yang tidak kecil. Pasar

Mimbaan baru berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis mengalami naik turun pendapatan retribusi dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Ini bukanlah hal yang baik karena retribusi pasar merupakan salah satu komponen penting dalam hal pendapatan daerah dan mengingat bahwa Pasar Mimbaan Baru merupakan pasar terbesar di Kabupaten Situbondo maka seharusnya retribusi yang dihasilkanpun bisa besar pula dan stabil untuk menunjang pendapatan daerah. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Situbondo, yang merupakan dinas yang menaungi dan mengelola pasar, Pasar Mimbaan Baru pada tahun 2017 mengalami penurunan jumlah retribusi pelayanan pasar. Pada tahun 2015, realisasi dari retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 226. 603. 000. Pada tahun 2016, realisasinya adalah Rp.211.828.200. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sejumlah Rp.175.824.000

Turunnya retribusi pelayanan pasar di Pasar Mimbaan Baru ini sebenarnya cukup miris karena melihat fakta bahwa pasar tersebut merupakan pasar bertipe A yang ada di Kabupaten Situbondo. Pasar yang bisa menampung banyak penjual dan bisa menampung juga pembeli yang datang karena memang kapasitas dari pasar ini sendiri yang besar. Akan tetapi jika melihat fakta diatas bahwa retribusi pelayanan pasar mereka turun dari tahun 2016 ke tahun 2017, sungguh sangat disayangkan dimana seharusnya pasar tersebut bisa dimanfaatkan dengan lebih baik retribusi pelayanan pasarnya.

Turunnya retribusi pelayanan pasar ini bisa saja terjadi karena banyak hal yang diantaranya bisa terjadi karena penataan dan pengelolaan dari Disperindag

Kabupaten Situbondo. Penataan dan pengelolaan pasar penting sekali untuk dilakukan dengan benar karena saat ini pasar tradisional sedang bersaing dengan toko-toko modern yang ada di Kabupaten Situbondo. Toko-toko modern ini yang salah satu diantaranya ada minimarket dan supermarket mulai marak di Kabupaten Situbondo. Meskipun belum ada mall besar di Kabupaten Situbondo akan tetapi ancaman dari toko-toko modern ini bisa nyata terhadap pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Situbondo.

Penataan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Disperindag untuk menata pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Situbondo supaya pasar-pasar tersebut bisa tetap menjadi pilihan masyarakat dalam berbelanja. Penataan pasar tradisional penting untuk dilakukan karena pasar tradisional saat ini menghadapi persaingan dari toko modern yang ada di Kabupaten Situbondo. Penataan pasar tradisional inilah yang bisa menjadi cara Disperindag untuk membuat pasar tradisional bisa tetap bersaing dengan toko modern dan mengikuti tuntutan para pelanggan.

Penataan pasar tradisional bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti misalnya menata tempat orang berjualan dan menata kebersihan yang ada di pasar tersebut. Menata tempat para pedagang penting untuk dilakukan karena dengan penataan para pedagang akan memudahkan para pembeli dalam mencari barang yang mereka butuhkan. Penataan ini memang krusial karena pembeli tentu saja ingin berbelanja dengan cepat dan tidak terlalu lelah karena harus berkeliling pasar untuk mencari barang, tidak seperti di toko modern dimana semua barang sudah dikelompokkan sehingga mudah untuk dicari. Terlebih lagi Pasar Mimbaan Baru

adalah pasar bertipe A dimana pasar tersebut adalah pasar dengan luas yang cukup luas dan bisa menampung pedagang dalam jumlah yang besar. Sehingga penataan pedagang ini penting dilakukan untuk kenyamanan para pembeli.

Selain penataan tempat pedagang, penataan yang tidak kalah pentingnya dilakukan adalah menata kebersihan di pasar tradisional. Sudah bukan rahasia lagi jika pasar tradisional saat ini di kategorikan sebagai tempat yang kotor, becek, dan tidak nyaman. Hal yang sangat berbanding terbalik jika melihat toko modern yang lebih bersih, dingin, dan lebih nyaman untuk para pembeli. Kebersihan memang sangat penting untuk diperhatikan karena terkait dengan kenyamanan para pembeli. Jika pasar tradisional tempat mereka membeli bersih, maka mereka akan nyaman dalam berbelanja dan lebih memilih untuk berbelanja di pasar tradisional. Terlebih pasar tradisional masih dikenal sebagai tempat yang bisa melakukan tawar menawar harga, tidak seperti toko modern yang harganya sudah pasti. Dengan ini maka pembeli bisa menyesuaikan dengan uang yang dimiliki dalam berbelanja dan kenyamanan bisa menjadi salah satu alasan bagi pembeli untuk berbelanja di pasar tradisional.

Sementara itu pengelolaan pasar tradisional juga tidak kalah pentingnya dilakukan oleh Disperindag. Pengelolaan sama seperti penataan juga penting dilakukan karena pasar tradisional jika dikelola dengan benar, dalam hal ini segala hal terkait dengan pedagang seperti pendataan pedagang, dan mengelola dana yang ada. Mengelola pasar tradisional bisa menjadi hal yang vital juga seperti halnya penataan dimana pengelolaan bisa juga terkait dengan dana dalam melakukan penataan sehingga pengelolaan saling berkait dengan penataan yang dilakukan.



Pasar Mimbaan Baru dengan area yang luas dan jumlah pedagang yang banyak menuntut untuk dikelola dengan baik karena jika tidak maka pasar tradisional tersebut akan terbengkalai. Pengelolaan adalah bagaimana Disperindag sehari-harinya menjalankan pasar tersebut.

Toko-toko modern bisa menjadi ancaman nyata bagi pasar tradisional jika pemerintah tidak menanggapi dengan serius pengelolaan dan penataan pasar-pasar tradisional. Hal ini bisa terjadi karena toko modern menawarkan hal-hal yang biasanya tidak atau bahkan belum dimiliki pasar tradisional. Adanya hal lain yang ditawarkan bisa membuat para pembeli atau pelanggan lebih memilih untuk melakukan transaksi di toko modern. Meskipun pasar tradisional masih menawarkan beberapa keunggulannya juga akan tetapi jika dibiarkan dan tidak ditata atau dikelola dengan baik maka pasar tradisional akan kalah dengan toko modern.

Tentu saja kalahnya pasar tradisional dengan toko modern dapat berakibat pada menurunnya retribusi pelayanan pasar yang ada di pasar manapun termasuk diantaranya adalah Pasar Mimbaan Baru. Pasar Mimbaan Baru merupakan salah satu pasar yang bisa jadi terancam dengan adanya toko modern yang mulai marak saat ini dibuka di Kabupaten Situbondo. Ancaman ini karena Pasar Mimbaan baru berada di tengah kota atau berada di pusat kota. Yang mana hal ini tentu saja juga dihadapkan dengan kenyataan bahwa di tengah kota saat ini mulai banyak toko modern yang bermunculan. Toko-toko ini mulai tersebar di setiap sudut kota mulai dari skalanya kecil hingga yang besar. Tentu saja ini menjadi ancaman untuk Pasar Mimbaan Baru.



Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal ini Disperindag kabupaten Situbondo yang merupakan pengelola dan penanggung jawab pasar harus lebih memperhatikan pengelolaan dan penataan pasar yang ada supaya tidak kalah saing akhirnya dengan toko modern. Utamanya adalah Pasar Mimbaan Baru yang merupakan pasar bertipe A di Kabupaten Situbondo. Tempat yang menjadi tumpuan hidup orang banyak yaitu pedagang karena pasar ini bisa menampung banyak sekali pedagang jika melihat dari luasnya. Jika pemerintah tidak menanggapi dengan serius permasalahan ini utamanya adalah turunnya retribusi maka bisa jadi lama kelamaan Pasar Mimbaan baru akan ditinggalkan oleh para pembelinya. Dan jika ini terjadi maka pemerintah sendiri yang akan rugi karena tidak bisa mendapatkan pemasukan dari pasar yang skalanya besar tersebut yang seharusnya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin berfokus pada bagaimana evaluasi dari pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Mimbaan Baru seperti yang tertuang dalam Perda No 13 Tahun 2014 tersebut. Penulis ingin mengetahui bagaimana evaluasi pengelolaan tersebut pada Pasar Mimbaan Baru apakah sesuai dengan peraturan yang ada dan apakah sudah dilaksanakan dengan maksimal atau belum untuk meningkatkan retribusi pelayanan pasar. Maka dari itu penulis mengajukan judul berupa **“EVALUASI PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR MIMBAAN BARU UNTUK MENINGKATKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TAHUN 2016-2017.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi penataan dan pengelolaan Pasar Mimbaan Baru untuk meningkatkan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2016-2017?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, adapun tujuan dilaksanakannya penelitian, yaitu:

1. Untuk menganalisis bagaimana evaluasi penataan dan pengelolaan Pasar Mimbaan Baru dalam upaya meningkatkan retribusi pelayanan pasar disana.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dapat memberikan dua manfaat yaitu baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut, yaitu:

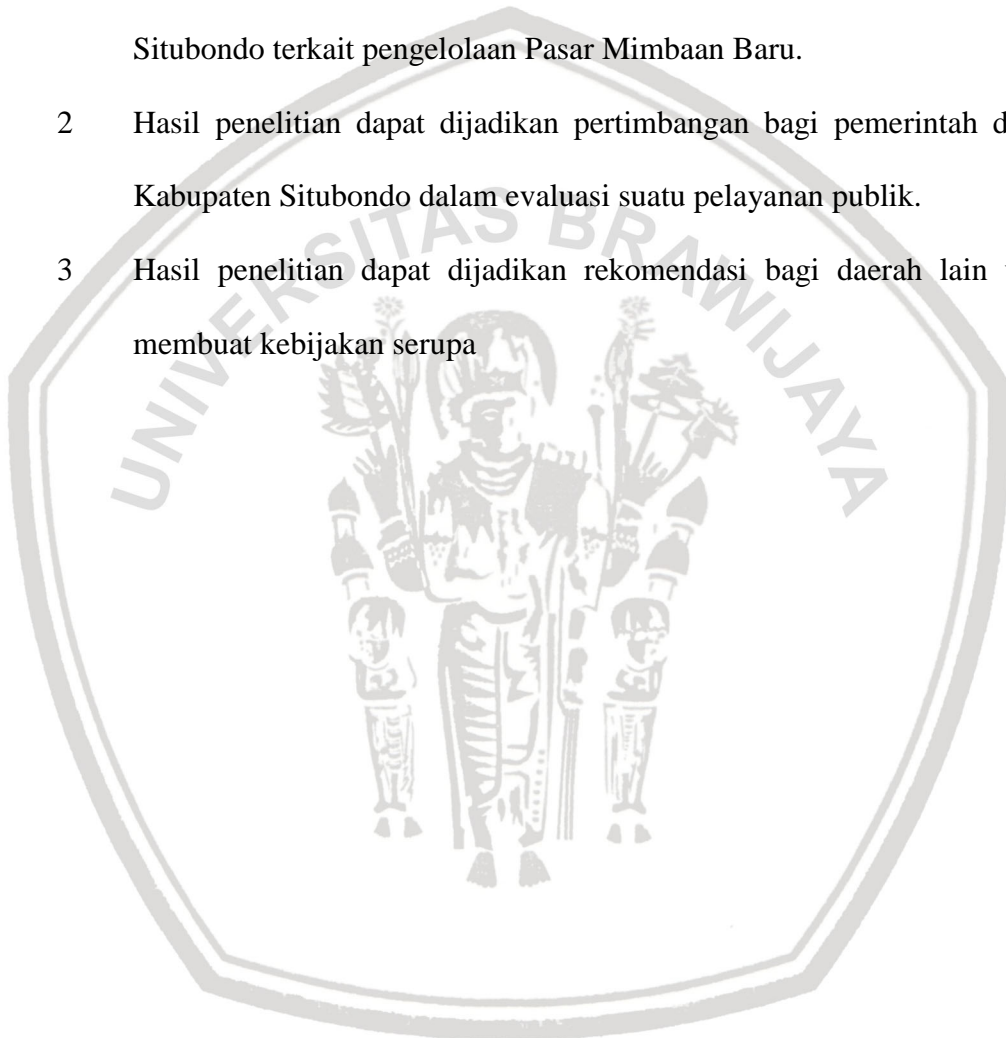
### 1.4.1 Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran berupa wacana terkait evaluasi penataan pengelolaan pasar tradisional dalam meningkatkan retribusi pelayanan pasar di Pasar Mimbaan Baru .
2. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan pengembangan pengetahuan terkait mata kuliah pelayanan publik.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber wawasan keilmuan baru yang bermanfaat bagi akademisi, pemerintah maupun masyarakat luas.

4. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan ataupun referensi bagi peneliti berikutnya khususnya yang meneliti tentang pelayanan publik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- 1 Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Situbondo terkait pengelolaan Pasar Mimbaan Baru.
- 2 Hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo dalam evaluasi suatu pelayanan publik.
- 3 Hasil penelitian dapat dijadikan rekomendasi bagi daerah lain untuk membuat kebijakan serupa



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Bab II terkait tinjauan pustaka ini akan dibahas terkait dengan beberapa sub-bab diantaranya adalah penelitian terdahulu, kajian teori dan alur pikir dari penelitian. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan pijakan untuk membedakan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya, kajian teori dijadikan acuan peneliti untuk menganalisis data yang ada dilapangan dengan teori yang ada. Terakhir, alur pikir penelitian dijadikan penulis untuk membuat kerangka acuan dalam melakukan penelitian.

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian terdahulu dengan fokus bahasan yang masih bersinggungan terkait dengan implementasi kebijakan penataan dan pebgelolaan pasar tradisional pada Pasar Mimbaan Baru. Hasil penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan pijakan atau referensi oleh peneliti dalam melakukan penelitian dan mencari perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan atau referensi adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Theodorus G J Batlajeri (2016) dengan judul Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung dilakukan sesuai dengan kebijakannya karena tumbuh suburnya sektor ekonomi

informal. Kawasan tujuh titik zona merah yang sebenarnya tidak boleh terdapat PKL sampai sekarang ini masih ada PKL yang berjualan di sekitar kawan tersebut sehingga kebijakan tersebut perlu untuk di evaluasi ulang oleh peneliti. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N Dunn. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL yang dilakukan masih belum mencapai hasil yang baik karena ada sebagian pihak yang merasa dirugikan dari penetapan kebijakan khususnya PKL dan kurangnya sosialisasi yang menyeluruh agar diketahui oleh semua pihak.

*Kedua*, Robby Kurniawan Junaidy (2014), dengan judul penelitian Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban dan Pembinaan Gelandang dan Pengemis di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru membuat kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk produk hukum berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Namun pelaksanaannya jauh dari yang diharapkan, sampai saat ini permasalahan pengemis sulit diatasi dan masih banyak pengemis yang berkeliaran sehingga menyulitkan Pemerintah Kota Pekanbaru. Disini peneliti ingin mengevaluasi kebijakan tersebut untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut berjalan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N Dunn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial masih belum bisa



dilaksanakan dengan seoptimal mungkin. Kriteria efektivitas dari evaluasi kebijakan ketertiban sosial di Kota Pekanbaru tidak tercapai.

*Ketiga*, Nelma Netti (2016), dengan judul penelitian Evaluasi Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini berfokus kepada bagaimana evaluasi penataan kawasan Terminal Simpang Aur Kota Bukittinggi dan apa saja faktor yang mempengaruhi evaluasi penataan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi. Terminal Simpang Aur Kuning awalnya berfungsi sebagaimana mestinya, akan tetapi karena pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pedagang kaki lima, ekspansi menjadi tidak terhindarkan sehingga banyak ruang dari terminal tersebut yang akhirnya digunakan oleh pedagang kaki lima. Sementara itu dibagian luar terminal dibangun terminal bayangan yang mengambil lahan dari SMAN 3 Bukittinggi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut tentang evaluasi pengelolaan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N Dunn. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan kawasan terminal ini belum dilakukan dengan baik dan perlu diadakannya perluasan terminal dengan keterbatasan wilayah yang ada. Pemerintah diharapkan bisa menyelesaikan masalah toko-toko yang membangun bangunannya di wilayah terminal dan membangun layanan infrastruktur untuk meningkatkan sumber daya manusia.

*Keempat*, Rifki Febrihanuddin (2017), dengan penelitian yang berjudul Evaluasi Kebijakan Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar



Lampung. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pertumbuhan minimarket di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya meningkat 20 persen, dengan jumlah pertumbuhan tersebut dikhawatirkan akan mematikan warung tradisional. Untuk membangun sebuah minimarket sudah dibuat aturan berupa Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012. Namun kebijakan ini belum dapat mengendalikan jumlah pertumbuhan minimarket yang semakin menjamur sehingga peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Bardach. Hasil penelitian ini adalah pada aspek *technical feasibility* telah tercapai secara tujuan namun masih lemah dalam penindakan pelanggaran sehingga belum memuaskan kelompok sasaran. Selanjutnya pada aspek *economic* dan *financial possibility* sudah terlaksana dengan baik. Pada aspek *political viability* kebijakan ini tidak melanggar peraturan-peraturan sebelumnya, selanjutnya aspek *administrative operability* pemerintah telah mengimplementasi dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Teori	Metode	Hasil
1	Theodorus G J Batlajeri (2016) Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung	Teori Evaluasi Kebijakan Publik Oleh William N Dunn	Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif	Evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL yang dilakukan masih belum mencapai hasil yang baik karena ada sebagian pihak yang merasa dirugikan dari penetapan kebijakan khususnya PKL dan kurangnya sosialisasi yang menyeluruh agar diketahui oleh semua pihak
2	Robby Kurniawan Junaidy (2014), Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban dan Pembinaan Gelandang dan Pengemis di Kota Pekanbaru	Teori Evaluasi Kebijakan Publik Oleh William N Dunn	Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif	Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial masih belum bisa dilaksanakan dengan seoptimal mungkin. Kriteria efektivitas dari evaluasi kebijakan

				ketertiban sosial di Kota Pekanbaru tidak tercapai
3	Nelma Netti (2016), Evaluasi Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi	Teori Evaluasi Kebijakan Publik Oleh William N Dunn	Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif	Pengelolaan kawasan terminal ini belum dilakukan dengan baik dan perlu diadakannya perluasan terminal dengan keterbatasan wilayah yang ada. Pemerintah diharapkan bisa menyelesaikan masalah toko-toko yang membangun bangunannya di wilayah terminal dan membangun layanan infrastruktur untuk meningkatkan sumber daya manusia
4	Rifki Febrihanuddin (2017), Evaluasi Kebijakan Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung	Teori evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Bardach	Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif	Pada aspek <i>technical feasibility</i> telah tercapai secara tujuan namun masih lemah dalam penindakan pelanggaran sehingga

				<p>belum memuaskan kelompok sasaran. Selanjutnya pada aspek <i>economic</i> dan <i>financial possibility</i> sudah terlaksana dengan baik. Pada aspek <i>political viability</i> kebijakan ini tidak melanggar peraturan-peraturan sebelumnya, selanjutnya aspek <i>administrative operability</i> pemerintah telah mengimplem entasi dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
--	--	--	--	---

Sumber : Data diolah oleh penulis 2018

Hasil dari pengamatan beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan beberapa contoh penelitian terdahulu diatas. Peneliti disini akan lebih berfokus kepada bagaimana evaluasi dari Peratutran Daerah (Perda) No 13 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengelolaan

Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Toko Modern. Peneliti disini juga lebih berfokus kepada satu objek yaitu Pasar Mimba Baru Disini bisa dilihat objek dan lokasi penelitian yang sangat berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dan belum ada yang mengkaji tentang evaluasi penataan dan pengelolaan pasar tradisional seperti yang dilakukan oleh penulis.

## **2.2 Kerangka Teoritik**

Pada bab ini akan dijelaskan teori yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Terdapat teori kebijakan publik dan evaluasi kebijakan publik yang akan digunakan dalam penelitian ini oleh peneliti. Teori ini relevan untuk menjelaskan evaluasi kebijakan penataan dan pengelolaan pasar tradisional pada Pasar Mimbaan baru.

### **2.2.1 Evaluasi Kebijakan Publik**

Apabila suatu kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan yang saling berurutan dan terkait antara satu dengan yang lain maka tahap evaluasi merupakan tahapan terakhir dari suatu proses kebijakan karena evaluasi dilakukan terakhir oleh para pembuat kebijakan setelah melaksanakan implementasi kebijakan yang telah mereka buat. Beberapa ahli mengutarakan tentang definisi dari evaluasi kebijakan publik yang diantaranya adalah Lester dan Stewart yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.<sup>1</sup> Lalu menurut Jones, dalam bahasa yang lebih ringkas

---

<sup>1</sup> Budi Winarno, 2014, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Pringwulung, Center of Academic Publishing Service, hlm 229



lagi, evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.<sup>2</sup>

Secara umum evaluasi kebijakan bisa di definisikan sebagai suatu kegiatan atau proses kegiatan yang di dalamnya berisi tentang penilain-penilain kebijakan yang usdah dilakukan mulai dari formulasi kebijakan sampai dengan implementasi. Evaluasi kebijakan juga dapat mengukur dampak dari suatu kebijakan, apakah kebijakan yang dikeluarkan memiliki dampak yang besar terhadap penerima kebijakan atautkah hanya berdampak kecil saja. Akan tetapi suatu evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan saat akhir atau selesainya kebijakan, tetapi suatu evaluasi juga bisa dilakukan dari seluruh proses kebijakan yang ada dimulai dari formulasi kebijakan sampai dengan implementasi. Setiap proses bisa dilakukan evaluasinya masing-masing. Maka dengan demikian suatu evaluasi kebijakan bisa dilakukan untuk melihat tahap perumusan masalah, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, implementasi dari program tersebut sampai kepada dampak dari kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan publik dapat dibedakan ke dalam dua tugas yaitu, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas kedua yaitu adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan acuan ataupun patokan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>3</sup> bila lebih dijabarkan lebih lanjut terkait dengan kedua tugas tersebut, maka evaluasi

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 229

<sup>3</sup> *Ibid*



kebijakan publik di dalam tugas pertama merujuk kepada suatu upaya untuk melihat apakah kebijakan yang dikeluarkan sudah sesuai dan memiliki dampak kepada yang menerima kebijakan, ataukah belum berdampak apa-apa. Jika memang belum berdampak maka apa saja faktor yang mempengaruhinya. Sementara itu di dalam tugas kedua dalam evaluasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui apakah kebijakan yang sudah dikeluarkan tersebut memiliki dampak yang diinginkan oleh pembuat kebijakan ataukah masih belum memenuhi dampak yang diinginkan. Tugas kedua ini juga bisa dikatakan sebagai penilaian dari sebuah kebijakan karena evaluasi disini melihat apakah kebijakan yang dikeluarkan gagal ataukah berhasil.

### **2.2.2 Langkah Dalam Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau sering juga disebut dengan evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan. Menyangkut evaluasi kebijakan, evaluasi didorong oleh syarat-syarat yang legal untuk melakukan evaluasi. Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Salah satu ahli tersebut adalah Edward A Suchman

Suchman mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :<sup>4</sup>

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan

---

<sup>4</sup> *Ibid* hlm 233

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
  1. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
  2. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Suchman berdasarkan dengan langkah-langkah dalam melakukan evaluasi kebijakan yang sudah dikemukakan oleh Suchman diatas. Peneliti beranggapan bahwa teori tersebut cocok untuk melihat dan membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini. Teori tersebut peneliti anggap cocok karena dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana evaluasi dari penataan dan pengelolaan dari Pasar Mimbaan Baru. Peneliti lebih dulu ingin mengetahui apa tujuan dari program-program yang dijalankan oleh Disperindag untuk menata dan mengelola pasar tersebut. Lalu peneliti ingin melihat apakah ada masalah dari program tersebut dan apakah program tersebut memiliki dampak kepada penjual dan pembeli karena peneliti menganggap semua kebijakan yang dibuat untuk pasar nantinya harus memiliki dampak kepada penjual dan pembeli. Maka dari itu peneliti memilih teori ini karena peneliti menganggap teori ini cocok digunakan dalam penelitian ini. Peneliti mengangkat tentang bagaimana evaluasi dari penataan dan pengelolaan Pasar Mimbaan Baru untuk meningkatkan retirbusi pelayanan pasar tahun 2016-2017.

Pasar Mimbaan baru merupakan salah satu pasar besar yang ada di Kabupaten Situbondo. Pasar ini merupakan salah satu pasar andalan bagi para

masyarakat karena lengkapnya barang yang dijual oleh para pedagang di Pasar Mimbaan Baru. Akan tetapi Pasar Mimbaan baru menyimpan beberapa masalah yang diantaranya adalah pendapatan dari retribusi pelayanan pasar yang naik turun sejak tahun 2015, banyaknya pedagang yang gulung tikar, harga yang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan pasar lainnya dan keluhan dari masyarakat perihal fasilitas dari pasar yang belum memadai. Pemerintah Kabupaten Situbondo sebenarnya sudah mengeluarkan aturan terkait dengan pengelolaan dan penataan pasar melalui Peraturan Daerah (Perda) No 13 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Toko Modern. Peneliti memilih untuk menggunakan teori dari Suchman untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Langkah-langkah evaluasi yang akan dilakukan peneliti berdasarkan dengan teori Suchman tersebut adalah

Pertama, mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi. Program yang dilakukan Pemerintah untuk menata dan mengelola pasar tradisional tertuang kepada Perda No 13 Tahun 2014. Perda tersebut mengatur tentang bagaimana penataan dan pengelolaan dari pasar tradisional supaya pasar bisa terus bertahan di tengah maraknya pasar modern dan toko modern. Kedua, analisis terhadap masalah. Masalah yang ada di Pasar Mimbaan baru sebenarnya cukup rumit karena saling berhubungan satu sama lain yaitu tidak konsistennya retribusi pelayanan pasar yang diterima semenjak tahun 2015 sampai tahun 2017. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa masalah lainnya yaitu banyaknya pedagang yang gulung tikar dan sepiya minat pembeli. Ketiga, deskripsi dan standarisasi kegiatan. Kegiatan atau langkah-langkah yang sudah diambil oleh Pemkab Situbondo apa saja dalam

melaksanakan Perda tersebut. Keempat, pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi. Perubahan apa saja yang terjadi selama tahun 2016-2017 semenjak Pemkab menjalankan kebijakan tersebut dan bagaimana perubahan tersebut. Kelima, menentukan apakah perubahan tersebut merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau dari penyebab lain. Apakah perubahan-perubahan yang terjadi setelah kebijakan penataan dan pengelolaan pasar tradisional tersebut merupakan hasil dari kebijakan tersebut ataukah perubahan tersebut karena beberapa faktor lain yang terjadi di Pasar Mimbaan Baru. Keenam, beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Indikator-indikator yang ditetapkan oleh Pemkab untuk melihat apakah kebijakan penataan dan pengelolaan Pasar Mimbaan Baru memiliki dampak. Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi kebijakan penataan dan pengelolaan Pasar Mimbaan Baru untuk meningkatkan retribusi pelayanan pasar disana.

### **2.3 Alur Pikir**

Alur pemikiran dibuat untuk memudahkan pembaca dan peneliti dalam memahami cara berpikir dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan penataan dan pengelolaan Pasar Mimbaan Baru untuk meningkatkan retribusi pelayanan pasar Berikut merupakan alur pemikiran yang di buat peneliti dalam penelitian ini.

## Bagan 2.1 Alur Pikir Penelitian

### Permasalahan:

- Pendapatan asli daerah Kabupaten Situbondo yang mengalami penurunan tahun 2015-2017
- Penerimaan dari retribusi pelayanan pasar di Pasar Mimbaan Baru yang fluktuatif sejak tahun 2015-2017

### Langkah Dalam Evaluasi Kebijakan (Edward A Suchman)

#### 1. Mengidentifikasi tujuan Penataan dan Pengelolaan Pasar Mimbaan Baru

- Penataan dari pasar tradisional ini termasuk Pasar Mimbaan Baru dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Penataan dalam hal ini penataan yang dilakukan di Pasar Mimbaan Baru termasuk ke dalam pemberdayaan pasar tradisional. Pemberdayaan yang dilakukan adalah peremajaan dan revitalisasi pasar termasuk Pasar Mimbaan Baru

- Pengelolaan pasar terkait dengan retribusi pelayanan pasar tercantum di dalam Perda nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang merupakan aturan baru karena sebelumnya diatur di dalam Perda nomor 24 tahun 2011. Retribusi pelayanan pasar sendiri ditarik kepada para pedagang yang di pasar supaya mereka bisa berdagang disana dan supaya mereka mendapatkan ijin untuk berjualan di pasar tradisional.

#### 2. Menganalisis Masalah Penataan dan Pengelolaan Pasar Mimbaan Baru

- Penataan pada tahun 2016 tidak dilakukan di Pasar Mimbaan Baru karena Disperindag Kabupaten Situbondo karena harus bergantian dengan Pasar Pananrukan dan Pasar Kapongan. Pasar yang relatif lebih kecil skalanya dibandingkan dengan Pasar Mimbaan Baru sehingga tidak ada penataan apa-apa di tahun 2016

- Banyaknya pedagang yang tutup sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 membuat penarikan retribusi pelayanan pasar menjadi terhambat

#### 3. Mendeskripsikan dan Standarisasi Kegiatan

- Pembangunan atap kanopi pada tahun 2017 sepanjang 30 meter dengan diameter 9 meter. Pembangunan atap ini dilakukan di bagian tengah Pasar Mimbaan Baru.

- Untuk penarikan retribusi kios permanen adalah Rp. 700 /M<sup>2</sup> yang ditarik setiap hari. Kios disini adalah tempat pedagang yang memiliki atap dan dinding pemisah antara satu dengan lainnya. Sedangkan untuk retribusi los adalah Rp. 600/M<sup>2</sup> yang ditarik setiap hari. Los disini ada tempat berjualan pedagang yang beratap tetapi tidak dipisahkan dengan dinding satu sama lain. Sementara untuk ruko sendiri menurut Bapak Prima menggunakan perda berbeda, yaitu tentang pemanfaatan kekayaan daerah. Ruko untuk retribusi nya sendiri adalah Rp. 220.000/M<sup>2</sup>/lantai yang dibayarkan oleh pemilik ruko per tahun

#### 4. Mengukur Perubahan Jumlah Pembeli

-Tidak ada perubahan apapun yang terjadi terhadap jumlah pembeli yang datang menurut para pedagang yang berjualan disana semenjak pembangunan kanopi dilakukan pada tahun 2017. Jumlah pembeli tidak mengalami perubahan

#### 5. Menentukan Penyebab Daya Beli Masyarakat di Pasar Mimbaan Baru

- Para pembeli yang datang merupakan pelanggan tetap semenjak belum diadakannya pembangunan atap kanopi. Mereka memang berbelanja karena sudah berlangganan sejak lama. Bukan karena pembangunan tersebut

#### 6. Menentukan Indikator Dampak

Pendapatan yang pedagang Pasar Mimbaan Baru dapatkan sebelum dan sesudah pembangunan atap kanopi tersebut masih sama saja dan tidak ada peningkatan ataupun penurunan. Adanya peningkatan hanya terjadi di saat hari raya idul fitri akan tetapi setelah itu pendapatan mereka tetap seperti biasanya



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Di bab tiga ini, peneliti akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ketika melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan komponen yang sangat penting dalam penelitian ini karena metode penelitian merupakan alat yang sangat punya pengaruh terhadap penelitian yang dimulai dari mengumpulkan, mengolah, dan analisis-analisis data yang ada. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sementara itu untuk data yang digunakan oleh peneliti, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Selain itu dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian kali ini.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini berfokus kepada evaluasi penataan dan pengelolaan Pasar Mimbaan Baru di tahun 2016-2017. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif di dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada di dalam interaksi manusia.<sup>1</sup> Pengertian dari penelitian kualitatif ini menjelaskan kepada beberapa kata kunci yaitu antara lain berupa proses, memahami, kompleksitas atau

---

<sup>1</sup> Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu. Hlm 192

kerumitan, interaksi serta manusia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, proses adalah unsur yang utama di dalam penelitian kualitatif ini. Di penelitian kali ini, peneliti diharuskan untuk memahami dan mengerti tentang permasalahan apa saja yang akan diteliti sehingga penelitian ini bisa berbaur dengan peneliti yang sedang diteliti serta sudut pandang yang diambil oleh peneliti akan terlihat jelas. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang kompleks karena penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini menggunakan manusia sebagai objek penelitian ini yang merupakan makhluk yang selalu berinteraksi dan selalu berubah seiring berjalannya waktu yang membuat penelitian kali ini merupakan penelitian yang fleksibel. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk menggali atau membangun proposisi untuk menjelaskan makna yang ada di balik realita yang ada.<sup>2</sup> Penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif akan selalu berdasarkan kepada realita yang ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi di lapangan.

Peneliti memilih penelitian kualitatif dalam penelitian ini karena dalam melakukan penelitian ini, peneliti menjelaskan secara deskriptif bagaimana evaluasi dari penataan dan pengelolaan Pasar Mimbaan baru. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti akan secara langsung turun ke lapangan dan melakukan wawancara sebagai teknik dalam mengumpulkan data.

---

<sup>2</sup> Burhan Bungin. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm 124

### 3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah terkait dengan evaluasi penataan dan pengelolaan Pasar Mimbaan Baru tahun 2016-2017. Pengambilan objek penelitian akan diambil di Pasar Mimbaan Baru karena Pasar Mimbaan Baru adalah pasar besar yang terdapat di di kawasan kota Situbondo. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti ini adalah SKPD terkait dengan evaluasi penataan dan pengelolaan pasar yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo. Selain itu penelitian juga akan dilakukan langsung di Pasar Mimbaan Baru.

### 3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Di dalam penelitian, bisa dikatakan bahwa data adalah komponen yang sangat penting dan sangat vital. Data merupakan segala keterangan atau informasi mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>3</sup> Maka dari itu, semua informasi yang di dapat tidak semuanya adalah data. Data mempunyai peran penting di dalam penelitian. Penyelesaian masalah dari sebuah penelitian yang dilakukan sangat bergantung kepada data yang diperoleh apakah akurat atau tidak. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan

---

<sup>3</sup> Muhammad Idrua, 2009, "*Metode Penelitian Ilmu Sosial*", Jakarta : Erlangga. Hlm 61

data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>4</sup> Data primer ini didapatkan dari narasumber yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian yang bisa melalui wawancara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, dengan kata lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.<sup>5</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian biasanya berupa dokumentasi, buku serta informasi lain yang masih berkaitan dengan penelitian.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.<sup>6</sup> Di dalam penelitian kualitatif yang menjadi sumber data tidak di manipulasi sama sekali dan data yang didapat tidak dibuat-buat sebagaimana eksperimen. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Penjelasan mengenai wawancara dan dokumentasi adalah sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007, hlm 91

<sup>5</sup> Saifuddin Azwar, *Op. cit*

<sup>6</sup> Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian kualitatif*, Bandung : Alfabeta. Hlm 62

### 3.4.1 Wawancara

Wawancara adalah bentuk dari teknik pengumpulan data yang sering dilakukan di dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.<sup>7</sup> Data yang berhasil didapat melalui wawancara umumnya adalah data verbal yang bisa didapat melalui tanya jawab.

Di dalam penelitian kualitatif, wawancara yang mendalam biasanya tidak berstruktur. Namun demikian, peneliti boleh melakukan wawancara untuk penelitian kualitatif secara berstruktur.<sup>8</sup> Maka dari itu, wawancara yang terstruktur atau terencana yang akan dilakuakn oleh pewawancara akan disusun terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Ini dilakukan supaya narasumber yang diwawancarai oleh pewawancara dapat menjawab permasalahan yang ada. Berbeda dengan wawancara tak terstruktur yang mana merupakan wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu atau dengan kata lain sangat bergantung dengan keadaan atau subjek.<sup>9</sup> Sehingga di dalam wawancara

---

<sup>7</sup> Burhan Bungin, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali pers, Hlm. 155

<sup>8</sup> Tohirin , 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* , Jakarta : Raja Grafindo Persana, Hlm. 63

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Loc Cit.* Hlm 156



yang tidak terstruktur, pewawancara bisa menggali informasi secara mengalir sesuai dengan subyek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data berupa wawancara dipilih dengan alasan *pertama*, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan alami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. *Kedua*, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa mendatang.<sup>10</sup> Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yang dipilih bisa berpedoman kepada panduan wawancara yang sudah dibuat oleh pewawancara dan bisa disesuaikan dengan kondisi yang ditemui di lapangan. Ketika melakukan wawancara, hal-hal penting yang disampaikan oleh narasumber bisa dicatat langsung oleh pewawancara atau bisa juga direkam oleh pewawancara. Waktu dan tempat yang digunakan untuk wawancara bisa disesuaikan dengan kondisi pewawancara dan narasumber.

Dalam menentukan informan atau narasumber dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling bertujuan (*purposive sampling*). Jenis teknik sampling bertujuan ini digunakan oleh peneliti karena peneliti memilih informan secara khusus berdasarkan dengan kemampuan dari informan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Jenis informan yang dipilih oleh peneliti

---

<sup>10</sup> Hamid Patilima. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. Hlm. 63

digolongkan menjadi 3. Berikut jenis-jenis golongan informan yang dipilih oleh peneliti : <sup>11</sup>

1. Informan Kunci, yaitu merupakan orang pertama yang membuka sumber permasalahan dan dapat menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian. Informan merupakan informan yang banyak mengetahui permasalahan terkait objek yang diteliti
2. Informan Ahli, merupakan orang yang dekat dengan subjek penelitian dan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Informan pendukung, yaitu orang yang mengetahui fokus dari permasalahan dari penelitian. Informan ini di wilayah penelitian yang dilakukan.

Berikut adalah data informan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini karena berkaitan secara langsung dalam evaluasi penataan dan pengelolaan Pasar Mimbaan Baru di Kabupaten Situbondo :

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan Penelitian**

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak Salman	Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Pasar
2.	Bapak Prima	Kepala Seksi Pengelolaan Pasar
3.	Bapak Junaidi	Kepala UPTD Pasar Mimbaan Baru
4.	Mas Pri	Wartawan Radar Situbondo
5.	Ibu Sukiyah	Pedagang Pisang
6.	Bapak Ali	Pedagang Kerajinan Bambu
7.	Ibu Sukiyem	Pedagang buah-bahan

<sup>11</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana. Hlm 228

8.	Ibu Sudarsih	Pelanggan
9.	Ibu Dini	Pelanggan
10.	Bapak Suparno	Pelanggan

**Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018**

### 3.3.1 Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi, dengan cara mengumpulkan dokumen yang dapat memberi tambahan informasi dan juga keterangan maupun bukti yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Kelebihan dari metode dokumentasi ini adalah memakan biaya yang lebih murah, waktu dan juga tenaga yang bisa lebih efisien. Akan tetapi metode dokumentasi memiliki kelemahan, adalah ketika peneliti di dalam penelitian ini mendapatkan dokumen yang salah, maka data yang disajikan oleh peneliti akan turut salah pula.

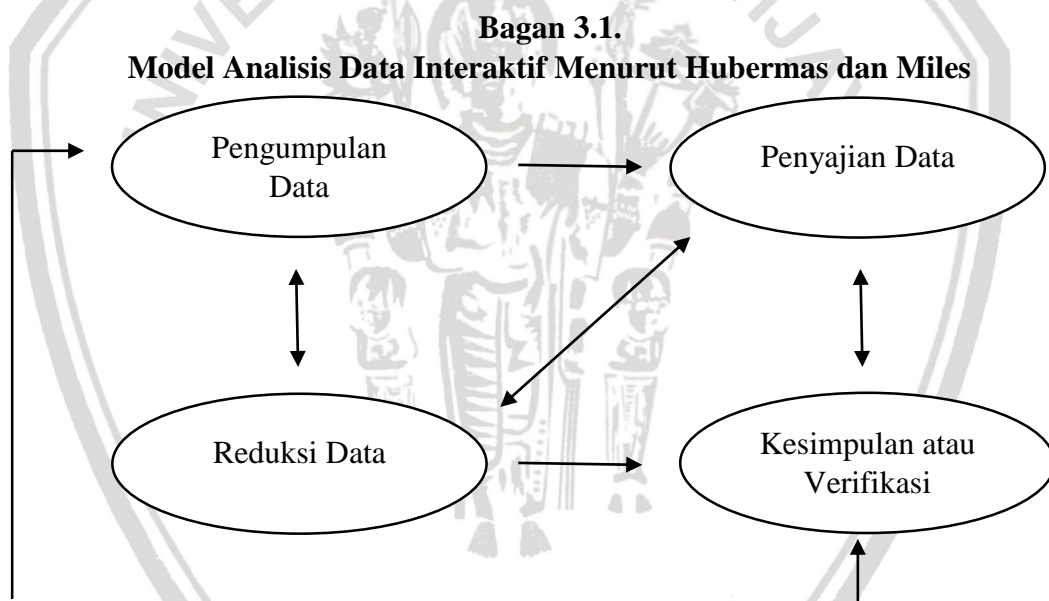
### 3.5 Teknik Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah di edit, diikhtisarkan dalam tabel, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang diperoleh.<sup>12</sup> Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data-data secara teratur dan rapi berdasarkan dengan temuan peneliti yang melalui pengamatan serta wawancara dan hal lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang terkait dan menjadikan data tersebut sebagai temuan, diedit, diklarifikasi, direduksi dan

<sup>12</sup> Colid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm 156

disajikan. Analisis data merupakan poses mengatur data, menyusun data, mengkategorikan dan menyatukan uraian dasar.<sup>13</sup>

Menurut Huberman dan Miles terdapat metode analisis data yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif yaitu model interaktif. Model interaktif terdiri dari 4 hal yang utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>14</sup> Tahap-tahap yang digunakan dalam analisis data model ini dilakukan oleh peneliti selama sebelum, saat dan sesudah pengumpulan data. Berikut merupakan gambaran model analisis data tersebut :<sup>15</sup>



Sumber: Miles dan Huberman .2014

<sup>13</sup> Tohirin. *Loc Cit* Hlm 141

<sup>14</sup> Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press. Hlm 20

<sup>15</sup> Haris herdiansyah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika. Hlm 164

#### a. Pengumpulan Data

Proses dari mengumpulkan data adalah proses yang mana peneliti mengumpulkan beberapa data yang bisa dijadikan penunjang dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pengumpulan data ini bisa dilakukan oleh peneliti pada saat sebelum, saat melakukan dan setelah melakukan penelitian. Hal ini karena di dalam penelitian kualitatif, tidak ada waktu yang spesifik di dalam mengumpulkan data. Selama melakukan penelitian maka selama itu proses mengumpulkan data juga dilakukan. Pengumpulan data bisa mulai dilakukan peneliti pada saat sebelum melakukan penelitian untuk mengetahui secara detail dan memahami tentang objek yang akan diteliti oleh peneliti dan melakukan observasi dalam menentukan target narasumber dan peneliti juga bisa mengambil data dari internet yang tersedia.

#### b. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah proses dari pengolahan data yang bisa didapatkan dan dilakukan dalam penelitian kualitatif. Reduksi data ini dimulai dari proses editing, koding dan tabulasi data. Reduksi data merupakan gabungan dari data-data yang diperoleh untuk dianalisis. Proses ini dilakukan peneliti saat peneliti sudah mendapatkan data dari narasumber dan data-data pendukung dan selanjutnya peneliti memilah-milah data, mana yang penting dan menggabungkan data yang memang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

#### c. Penyajian Data

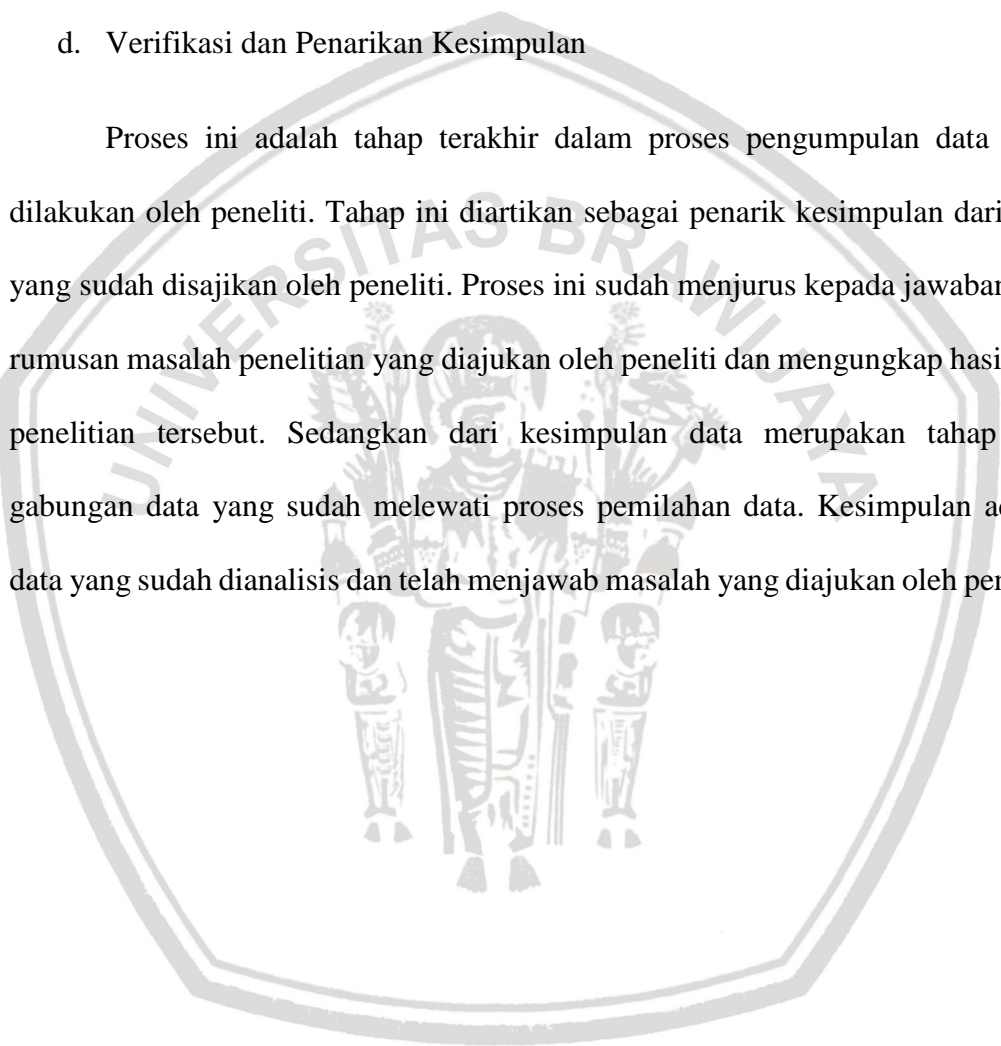
Proses ini merupakan tahap dalam mengolah data setengah jadi yang sudah sama ke dalam bentuk tulisan. Tulisan-tulisan tersebut sudah memiliki alur tema



yang jelas yang memang sesuai dengan penelitian yang diaktegorikan. Di dalam tahap penyajian data ini, peneliti akan menyajikan hasil reduksi yang sebelumnya telah dilakukan peneliti. Proses ini sangat penting untuk menampilkan data sesuai dengan alur pemikiran yang telah dibuat.

#### d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Proses ini adalah tahap terakhir dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Tahap ini diartikan sebagai penarik kesimpulan dari data yang sudah disajikan oleh peneliti. Proses ini sudah menjurus kepada jawaban dari rumusan masalah penelitian yang diajukan oleh peneliti dan mengungkap hasil dari penelitian tersebut. Sedangkan dari kesimpulan data merupakan tahap dari gabungan data yang sudah melewati proses pemilahan data. Kesimpulan adalah data yang sudah dianalisis dan telah menjawab masalah yang diajukan oleh peneliti.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

Pada bab keempat ini, akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian. Menjelaskan sekilas tentang Kabupaten Situbondo yang menjadi lokasi penelitian. Peneliti akan menjelaskan mengenai gambaran umum dan kondisi lokasi penelitian serta gambaran umum tentang Pasar Mimbaan Baru yang terdapat di Kabupaten Situbondo.

#### 4.1 Gambaran Umum dan Kondisi Lokasi Penelitian

Secara geografis Kabupaten Situbondo berada di Pulau Jawa dan berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Situbondo berada di ujung timur Pulau Jawa bagian utara antara 113°30'-114°42' Bujur Timur dan antara 7°35'-7°44' Lintang Selatan dengan temperatur tahunan sebesar 24,7°C-27,9°C. Daerah fisiknya memanjang dari barat ke timur sepanjang Selat Madura ±158km dengan lebar rata-rata ±11km. Batas wilayah Kabupaten Situbondo sebelah barat adalah Kabupaten Probolinggo, sebelah utara adalah Selat Madura, sebelah timur adalah Selat Bali dan sebelah selatan adalah Kabupaten Bondowoso serta Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Situbondo memiliki wilayah seluas 1.638,50 km<sup>2</sup> dan secara administratif terbagi ke dalam 17 kecamatan, 132 desa, 4 kelurahan serta 660 dusun.<sup>1</sup>

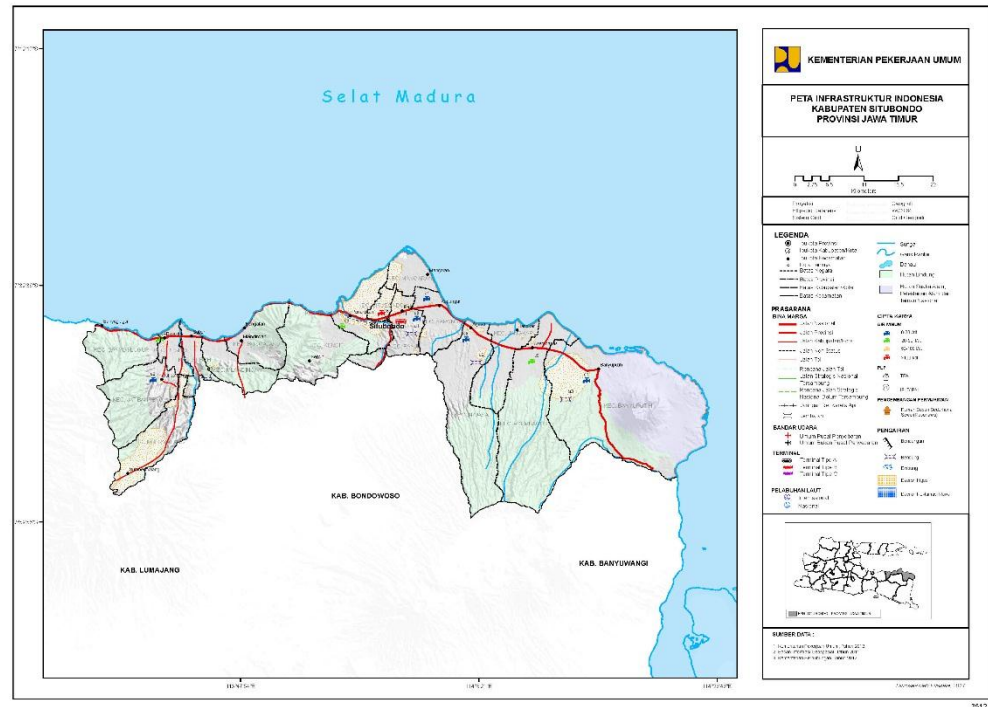
---

<sup>1</sup> <https://situbondokab.go.id/selayang-pandang/>, diakses pada tanggal 6 November 2018 pada pukul 09.00 WIB

Wilayah dataran dari Kabupaten Situbondo terdiri dari dataran tinggi berupa pegunungan yang menghasilkan produk-produk dari perkebunan dan dataran rendah dengan produk-produk pertaniannya serta Kabupaten Situbondo memiliki garis pantai yang panjang sehingga memungkinkan bagi Kabupaten Situbondo untuk memiliki produk-produk laut. Bagian selatan dari Kabupaten Situbondo umumnya adalah pegunungan dan pada bagian utara Kabupaten Situbondo terdapat laut sehingga Kabupaten Situbondo termasuk ke dalam daerah Pantai Utara (Pantura). Di bagian timur dan barat terdapat dataran rendah yang membentang dari timur ke barat. Di Kabupaten Situbondo terdapat satu aliran sungai besar yang bernama Aliran Sungai Sampeyan yang membentang dari Kabupaten Bondowoso sampai kepada Kabupaten Situbondo. Sungai ini menjadi sumber pengairan utama bagi area persawahan yang terdapat di Kabupaten Situbondo.

Selain di bidang pertanian, Kabupaten Situbondo merupakan daerah produksi tanaman perkebunan yang cukup produktif, serta memiliki potensi untuk menjadi daerah dengan penghasil produksi peternakan sehingga bisa dijadikan sebagai sumber perekonomian baru bagi masyarakat di Kabupaten Situbondo. Selain dari pertanian, perkebunan dan ternak, Kabupaten Situbondo juga terkenal dengan produk-produk lautnya. Ini dikarenakan Kabupaten Situbondo memiliki garis pantai yang cukup panjang dan berbatasan langsung dengan dua selat yaitu Selat Madura dan Selat Bali. Ke depannya pengembangan dari produk-produk laut dan pengembangan wisata pantai bisa terus dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo. Berikut peta Kabupaten Situbondo :

**Gambar 4.1**  
**Peta Kabupaten Situbondo**



Sumber : [loketpeta.pu.go.id/peta-infrastruktur-kabupaten-situbondo-2014](http://loketpeta.pu.go.id/peta-infrastruktur-kabupaten-situbondo-2014)

Kabupaten Situbondo secara administratif pada tahun 2017 terbagi ke dalam 17 kecamatan, 132 desa, 4 kelurahan dan 660 dusun. Adapun nama-nama 17 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Banyuglugur, Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panarukan, Situbondo, Panji, Mangaran, Kapongan, Arjasa, Jangkar, Asembagus, Banyuputih. Ibukota dari Kabupaten Situbondo terdapat di Kecamatan Situbondo dimana disana menjadi pusat pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo. Akan tetapi untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Situbondo baik itu insfrastruktur maupun manusianya, Pemerintah Kabupaten

Situbondo meresmikan *Second city of Situbondo* yang terdapat di Kecamatan Besuki untuk wilayah barat dan Kecamatan Asembagus untuk wilayah timur.

## 4.2 Kondisi Wilayah

### 4.2.1 Data Demografi

Berdasarkan data yang dihimpun peneliti berdasarkan Badan Pusat Statistika tahun 2010, 2015, dan 2016., jumlah penduduk pada tahun 2010 berjumlah 649.092. Pada tahun 2015, penduduk Kabupaten Situbondo berjumlah 669.713 dan pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Situbondo sejumlah 673.282. Pada tahun 2016, jumlah penduduk perempuan sejumlah 345.003. Sedangkan jumlah penduduk pria pada tahun 2016 sejumlah 328.279. Jumlah penduduk Kabupaten Situbondo ini tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Situbondo<sup>2</sup>.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Situbondo dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2010, 2015, dan tahun 2016 sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> <https://situbondokab.bps.go.id/statictable/2017/05/30/439/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-situbondo-2016.html>, diakses pada tanggal 15 November 2018 pada pukul 17.00 WIB



**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Situbondo 2010,2015, dan 2016**

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk	
	2010	2015	2016	2010-2016	2015-2016
Sumbermalang	26.366	26.422	26.408	0,03	0,05
Jatibanteng	21.891	22.171	22.206	0,24	0,16
Banyuglugur	22.498	23.456	23.628	0,82	0,73
Besuki	61.364	64.147	64.655	0,87	0,79
Suboh	26.245	27.014	27.144	0,56	0,48
Mlandingan	22.411	22.441	22.425	0,01	0,07
Bungatan	24.471	25.157	25.271	0,54	0,45
Kendit	28.226	28.531	28.566	0,20	0,12
Panarukan	53.169	55.829	56.322	0,96	0,88
Situbondo	46.952	47.924	48.073	0,39	0,31
Mangaran	32.009	32.922	33.075	0,55	0,46
Panji	68.461	71.874	72.507	0,96	0,88
Kapongan	37.075	38.222	38.417	0,59	0,51
Arjasa	39.791	40.567	40.685	0,37	0,29
Jangkar	36.395	37.030	37.121	0,33	0,25
Asembagus	47.348	47.933	48.003	0,23	0,15
Banyuputih	54.420	58.073	58.776	1,29	1,21
Situbondo	649.092	669.713	673.282	0,61	0,53

Sumber : Data Dari BPS Kabupaten Situbondo

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Situbondo dari semua kecamatan cukup banyak, mencapai angka enam ratus ribu mulai dari tahun 2010, 2015, dan tahun 2016. Penduduk di Kabupaten Situbondo tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Kecamatan paling banyak memiliki penduduk sejak tahun 2010 adalah Kecamatan Panji dengan jumlah penduduk sebanyak tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh penduduk pada tahun 2016. Sementara itu Kecamatan Situbondo yang merupakan ibu kota Kabupaten Situbondo memiliki jumlah penduduk hanya empat puluh delapan ribu tujuh puluh tiga pada tahun 2016. Penduduk Kabupaten Situbondo tidak hanya berpusat di ibu kota kabupaten akan tetapi juga masih ada yang lebih memilih untuk tinggal di kecamatan-kecamatan lain.

Sementara itu untuk laju pertumbuhan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bisa dilihat bahwa Kabupaten Situbondo mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,53. Pertumbuhan paling besar diantara kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Situbondo pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adalah Kecamatan Banyuputih dengan laju pertumbuhan sebesar 1,21. Sementara itu untuk Kecamatan Situbondo sebagai ibu kota kabupaten, mengalami laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebesar 0,31. Masih kalah jika dibandingkan dengan Kecamatan Besuki yang merupakan ibu kota kedua bagi Kabupaten Situbondo, dimana Kecamatan Besuki mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,79 pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Untuk kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk paling sedikit adalah kecamatan

paling barat dari Kabupaten Situbondo yaitu Kecamatan Sumbermalang dengan laju pertumbuhan 0,05 pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.

#### 4.2.2 Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita merupakan suatu perhitungan dimana biaya yang dikeluarkan oleh sebuah keluarga atau rumah tangga untuk konsumsi mereka selama sebulan dibagi dengan banyaknya jumlah anggota keluarga yang mereka miliki. Penghitungan pengeluaran perkapita ini banyak digunakan untuk melihat bagaimana pola konsumsi dari suatu keluarga atau rumah tangga yang secara umum dilihat menggunakan indikator dari makanan dan non makanan. Pengeluaran perkapita ini memang ditujukan untuk melihat pola konsumsi dari masyarakat supaya dapat dilihat tingkat ekonomi dari suatu daerah yang diukur dari pengeluaran sebuah keluarga.

**Tabel 4.2**

**Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kabupaten Situbondo Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan 2012-2016**

Tahun	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan (Rupiah)					
	Rangkuman (Rupiah)			Persentase		
	Kelompok Makanan	Kelompok Non Makanan	Jumlah	Kelompok Makanan	Kelompok Non Makanan	Jumlah
2012	246.731	179.983	426.704	57,82	42,18	100
2013	261.936	191.789	453.725	57,73	42,27	100
2014	275.849	231.691	507.539	54,35	45,65	100
2015	317.979	274.567	592.546	53,66	46,34	100
2016	381.101	285.939	667.040	57,13	42,87	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2017

Untuk di Kabupaten Situbondo sendiri pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 seperti data yang dihimpun oleh peneliti melalui Badan Pusat Statistik, pengeluaran perkapita rata-rata perbulannya mengalami peningkatan. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2016, di Kabupaten Situbondo, rata-rata tiap keluarganya melakukan pengeluaran baik itu untuk kategori makanan maupun non makanan selalu mengalami peningkatan. Peningkatan ini bisa dilihat bahwa di Kabupaten Situbondo, daya beli masyarakat selalu mengalami peningkatan dan cenderung ke arah positif. Akan tetapi sebenarnya pengeluaran yang semakin besar juga bisa saja diakibatkan oleh harga-harga barang yang naik tiap tahunnya. Utamanya untuk kategori makanan yang pos pengeluarannya memang paling besar karena memang merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat. Bisa jadi bahan-bahan pokok di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan harga sehingga pengeluaran yang dikeluarkan oleh sebuah rumah tangga pun tiap tahunnya jika dirata-rata perbulan mengalami peningkatan.

Jika dilihat dari data diatas maka pada tahun 2012, pengeluaran untuk kategori makanan yang sejumlah Rp.246.731 yang merupakan pengeluaran terbesar pada tahun tersebut karena mendominasi pengeluaran masyarakat yaitu sejumlah 57,82 %. Sementara itu untuk kategori non makanan pengeluaran perkapita di Kabupaten Situbondo pada tahun 2012 sejumlah Rp. 179.983, jadi total perbulannya tiap rumah tangga di Kabupaten Situbondo pada tahun 2012 per bulannya melakukan pengeluaran sejumlah Rp.426.704 Untuk tahun 2013 sendiri pengeluaran di kategori makanan adalah sejumlah Rp.261.936 per bulannya dan

kategori non makanannya adalah sejumlah Rp.191.789 sehingga perbulannya pengeluaran perkapita di Kabupaten Situbondo sejumlah Rp.453.725

Pada tahun 2014, pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Situbondo perbulannya untuk kategori makanan adalah sejumlah Rp. 274.849 dan untuk kategori non makanannya sendiri adalah sejumlah Rp.231. 691 sehingga perbulannya pengeluaran perkapita mereka adalah sejumlah Rp.507.539. Di tahun 2015 pengeluaran perkapita di Kabupaten Situbondo adalah sejumlah Rp. 592.546 yang mencakup kategori makanan dan non makanan dimana makanan memiliki persentase 53,66 %. Di tahun 2016 sendiri pengeluaran perkapita Kabupaten Situbondo tiap bulannya adalah sejumlah Rp. 667.040 dimana pengeluaran untuk kategori makanan adalah sejumlah Rp.381.101 , yang memiliki persentase sebanyak 57,13% dari total pengeluaran perkapita mereka.

Jika dilihat dari data diatas maka kesejahteraan dari masyarakat di Kabupaten Situbondo masih rendah karena dilihat dari data jika persentase pengeluaran mereka untuk makanan yang masih tinggi yaitu menyentuh angka 50% setiap tahunnya. Karena menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan suatu daerah dapat dilihat dari pengeluaran perkapita disana. Jika persentase untuk pengeluaran makanan lebih rendah dari persentase pengeluaran untuk non makanan dari total pengeluaran maka tingkat kesejahteraan di daerah tersebut membaik atau baik. Akan tetapi jika persentase yang lebih besar adalah makanan maka kesejahteraan di daerah tersebut masih rendah karena masyarakat masih berfokus kepada pengeluaran makanan dan untuk pengeluaran non makanan tidak cukup



sehingga tingkatnya rendah.<sup>3</sup> Jadi bisa dilihat bahwa tingkat kesejahteraan dari masyarakat Situbondo masih rendah berdasarkan data yang dikeluarkan BPS tersebut.

#### 4.3 Pasar Di Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo sampai saat ini memiliki jumlah pasar tradisional aktif yang cukup banyak yaitu sejumlah 19 pasar tradisional. Jumlah tersebut terdapat di setiap kecamatan dari barat samapi timur Kabupaten Situbondo. Ke 19 pasar tradisional di Kabupaten Situbondo itu adalah pasar daerah yang dikelola oleh Disperindag Kabupaten Situbondo dan pendapatannya dari retribusi masuk ke kas daerah. Ke 19 pasar tradisional ini tidak termasuk ke dalam pasar hewan ataupun pasar desa. Pasar desa adalah pasar yang dikelola langsung oleh desa dan pendapatan retribusinya masuk ke kas desa.

Pasar merupakan tempat jual beli yang masih diandalkan oleh masyarakat di Kabupaten Situbondo. Utamanya adalah masyarakat yang tinggal di kecamatan-kecamatan yang masih belum ada atau jauh dari toko modern atau minimarket. Masyarakat yang tinggal di kecamatan-kecamatan tersebut mengandalkan pasar tradisional sebagai tempat mereka dalam mencari bahan-bahan kebutuhan pokok. Masih diminatinya pasar tradisional merupakan pertanda baik karena bisa menunjang perekonomian masyarakat lainnya yang menggantungkan kehidupannya dari berjualan di pasar tradisional. Pasar tradisional yang memiliki

---

<sup>3</sup> <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=197>, diakses pada tanggal 22 November 2018 pada pukul 19.00 WIB

keunggulan berupa harga yang masih bisa ditawarkan dan bahan-bahan makanan yang segar membuat masyarakat masih mengandalkan pasar tradisional.

Saat ini pasar tradisional di Kabupaten Situbondo sedang mengalami persaingan dengan toko modern yang dalam hal ini adalah minimarket yang mulai tersebar di seluruh Kabupaten Situbondo. Jumlah minimarket inipun bisa dibilang banyak pada tahun 2017. Di tahun 2017 berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, jumlah minimarket tersebut adalah sejumlah 65 minimarket. Dari jumlah 65 minimarket tersebut, terdiri dari 38 Indomaret dan 27 Alfamart. Di kota sendiri untuk swalayan besar terdapat 4 swalayan besar yang biasa digunakan masyarakat untuk beli bahan grosiran. Dari jumlah minimarket dan swalayan tersebut memang belum ada mall atau pusat perbelanjaan besar yang berdiri di Kabupaten Situbondo. Pasar Mimbaan Baru merupakan salah satu dari 19 pasar yang ada di Kabupaten Situbondo. Total Kabupaten Situbondo memiliki 19 pasar yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di sana mulai dari ujung timur sampai dengan ujung barat Kabupaten Situbondo. Salah satu pasar yang ada di disana adalah Pasar Mimbaan Baru. Pasar ini sendiri mulai beroperasi sejak tahun 1979 dan sampai sekarang tetap beroperasi dan merupakan pasar besar yang ada di Kabupaten Situbondo.

Pasar Mimbaan Baru merupakan salah satu pasar bertipe A yang ada di Kabupaten Situbondo. Pasar Mimbaan Baru merupakan pasar tradisional yang bertipe A. Pasar Mimbaan Baru bertipe A karena merupakan pasar dengan area besar yang ada di Kabupaten Situbondo. Pasar Mimbaan Baru dikategorikan sebagai pasar tipe A karena memiliki luas wilayah sebesar lebih dari 3.000 M<sup>2</sup>. Pasar

Mimbaan Baru pun bisa menampung lebih dari 150 pedagang sehingga dikategorikan sebagai pasar tipe A. Pasar Mimbaan Baru berada di tengah-tengah kota yaitu di Kelurahan Mimbaan. Letaknya yang strategis karena berada di tengah kota memudahkan masyarakat untuk berbelanja disana. Pasar Mimbaan baru merupakan pasar yang dikhususkan untuk dibuka lebih siang daripada pasar lain. Hal ini dikarenakan pasar ini memang ditujukan untuk para pembeli yang terbiasa untuk berbelanja lebih siang. Semenjak pertama kali dibuka, pasar ini memang merupakan pasar yang buka lebih siang dan tutup lebih sore dibandingkan pasar lainnya untuk menjadi alternatif para pembeli yang tidak sempat berbelanja di pagi hari. Pasar Mimbaan Baru sebagai pasar besar menjual aneka ragam kebutuhan masyarakat. Mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga baju dan peralatan elektronik dan peralatan rumah tangga dijual disana. Untuk keperluan sehari-hari seperti sayur, buah dan daging, pedagang ditempatkan di bagian dalam pasar dan berada di tengah-tengah pasar.

Sementara untuk penjual elektronik maupun keperluan barang rumah tangga lainnya berada di bagian depan dan menempati ruku-ruko. Pasar Mimbaan sendiri terdiri dari dua lantai dimana lantai kedua banyak diisi oleh pedagang yang berdagang pakaian dan berjualan jam tangan. Sedangkan lantai pertama dikhususkan untuk pedagang yang menjual keperluan sehari-hari untuk memudahkan masyarakat dalam membeli keperluan tersebut. Saat ini pengelolaan dari Pasar Mimbaan Baru dipegang oleh Disperindag Kabupaten Situbondo dimana sebelumnya Pasar Mimbaan Baru dan pasar-pasar lainnya yang ada di Kabupaten

Situbondo pengelolaannya berada pada tanggung jawab DPKAD Kabupaten Situbondo.



## BAB V

### ANALISIS EVALUASI PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR MIMBAAN BARU DI KABUPATEN SITUBONDO

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang jawaban dari rumusan masalah dengan rinci seperti yang tercantum di dalam bab pertama. Ruusan masalah tersebut adalah yang berkaitan dengan evaluasi penataan dan pengelolaan Pasar Mimbaan untuk meningkatkan retribusi pelayanan pasar tahun 2016-2017.

#### 5.1 Langkah-langkah Dalam Melakukan Evaluasi Kebijakan Publik

Analisis pada bab ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward A Suchman yang terdapat enam langkah dalam melakukan evaluasi kebijakan publik. Maka pada bab ini peneliti akan menganalisa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti menggunakan teori tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti di bab pertama.

##### 5.1.1 Mengidentifikasi tujuan Penataan dan Pengelolaan Pasar Mimbaan Baru

Penataan dan pengelolaan pasar terutama pasar tradisional merupakan tanggung jawab dari setiap pemerintah daerah. Pemerintah wajib untuk memperhatikan pasar tradisional yang ada di daerahnya supaya tidak kalah bersaing dengan pasar-pasar modern yang saat ini sudah mulai marak di setiap daerah. Penataan dan pengelolaan wajib dilakukan untuk melindungi pedagang yang berjualan di pasar tradisional supaya mereka bisa terus bertahan dengan mata pencahariannya tersebut dan tidak sampai membuat pasar-pasar tradisional sepi



atau bahkan tutup karena kalah bersaing dengan pasar modern seperti minimarket, supermarket atau bahkan mall.

Penataan dan pengelolaan pasar tradisional juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), pemerintah mencoba untuk melindungi para pedagang dan pasar tradisional dari maraknya pasar modern yang sudah mulai banyak di Kabupaten Situbondo. Meskipun pasar modern tersebut baru sekedar minimarket dan toko-toko modern, belum sampai kepada mall yang memang belum ada di Kabupaten Situbondo. Akan tetapi jika tidak ditata dan dikelola dengan baik maka pasar-pasar tradisional tersebut akan kalah bersaing dengan pasar modern tersebut.

Pasar Mimbaan Baru adalah salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Situbondo. Pasar Mimbaan Baru merupakan salah satu pasar dengan area besar dan luas. Pasar Mimbaan Baru mulai beroperasi sejak tahun 1979, sejak saat itu hingga sekarang Pasar Mimbaan Baru tetap beroperasi dan masih menjadi pasar besar di Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2017, Pasar Mimbaan Baru memiliki jumlah pedagang sebanyak 105 pedagang yang terdiri dari beberapa macam pedagang mulai dari pedagang buah, sayur, daging hingga yang menjual elektronik.

Penataan dan pengelolaan Pasar Mimbaan Baru berada dalam tanggung jawab Disperindag Kabupaten Situbondo. Sebelumnya penataan dan pengelolaan Pasar Mimbaan Baru berada dalam tanggung jawab Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Situbondo. Pemindahan ini dilakukan untuk

lebih mengoptimalkan penataan yang ada di pasar karena pasar termasuk ke dalam perdagangan yang merupakan tanggung jawab dari Disperindag. Pemindahan tanggung jawab ini terjadi sejak tahun 2015 yang diinstruksikan langsung saat itu oleh Bupati Kabupaten Situbondo.

Penataan dari pasar tradisional ini termasuk Pasar Mimbaan Baru dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Penataan dalam hal ini penataan yang dilakukan di Pasar Mimbaan Baru termasuk ke dalam pemberdayaan pasar tradisional. Menurut Bapak Salman selaku Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Pasar, penataan yang difokuskan oleh Disperindag semenjak memegang tanggung jawab pasar adalah untuk memberdayakan pasar tradisional. Pemberdayaan pasar dalam hal ini adalah terkait dengan revitalisasi dan peremajaan pasar. Hal ini terdapat di dalam pasal 21 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2014 tersebut.

“Penataan untuk pasar tradisional semua di Situbondo itu pemberdayaan pasar mas. Pemberdayaan supaya pasar tradisional bisa bersaing dengan supermarket-supermarket yang ada. Ya dengan cara di revitalisasi dan peremajaan bangunan yang ada termasuk Pasar Mimbaan.”<sup>1</sup>

Pemberdayaan pasar dilakukan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern yang sudah mulai marak

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Salman Selaku Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Pasar. Pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 pada pukul 08.00 WIB di Kantor Disperindag Kabupaten Situbondo

di Kabupaten Situbondo. Meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap toko modern bisa dilakukan dengan banyak cara. Akan tetapi saat ini semenjak Disperindag memegang tanggung jawab mengelola dan menata pasar, fokus mereka adalah untuk merevitalisasi pasar dan peremajaan terhadap pasar-pasar yang ada di Kabupaten Situbondo. Pasar Mimbaan Baru tidak terkecuali karena di Pasar Mimbaan baru terdapat peremajaan pasar meskipun dalam skala yang masih kecil.

Peremajaan pasar dilakukan secara bertahap oleh Disperindag Kabupaten Situbondo terhadap seluruh pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Situbondo termasuk Pasar Mimbaan Baru. Peremajaan dan revitalisasi pasar yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo dilakukan mulai dari skala kecil seperti perbaikan ringan hingga sampai perombakan total atau renovasi besar-besaran. Peremajaan dan revitalisasi ini merupakan program utama yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo dalam upaya penatan pasar tradisional yang ada disana. Semua pasar diharapkan bisa direvitalisasi semua untuk kenyamanan pedagang dan pembeli sehingga pembeli lebih memilih untuk membeli di pasar tradisional dan lebih nyaman serta betah berada di pasar tradisional.

Selama ini persepsi masyarakat yang ada tentang pasar tradisional adalah bahwa pasar-pasar tradisional yang ada di daerah termasuk Kabupaten Situbondo masih terkesan kumuh, tidak terawat, tidak higienis dan becek ketika ada hujan serta panas ketika cuacanya justru cerah. Hal ini masih menjadi persepsi yang umum di dalam masyarakat sehingga mereka terkadang lebih memilih untuk belanja di toko modern atau pusat perbelanjaan. Kenyamanan dan keamanan

menjadi faktor utama bagi masyarakat memilih toko modern dan pusat perbelanjaan meskipun harganya bila dibandingkan dengan pasar tradisional sedikit lebih mahal dan tidak bisa ditawar. Akan tetapi jika melihat dengan kenyamanan yang diberikan maka mereka menganggap sepadan dengan biaya yang mereka keluarkan.

Seperti yang diungkapkan oleh wartawan Radar Situbondo, Mas Pri ketika diwawancarai oleh peneliti yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat kita saat ini berdasarkan dengan pantauan yang dilakukan oleh kami, terjadi perubahan pola beli dimana banyak dari mereka yang lebih memilih untuk membeli beberapa kebutuhan di minimarket seperti Indomaret atau Alfamart. Ini karena mereka merasa lebih nyaman berbelanja disana. Tempat yang bersih, dingin karena ber AC, membuat mereka nyaman meskipun harganya lebih mahal. Tetapi sepadan dengan pelayanan yang diberikan. Para pelayan juga ramah dimana setiap pembeli disambut dan setelah membayar mereka mengucapkan terima kasih kepada para pembeli. Hal yang berkebalikan dengan di pasar tradisional dimana biasanya untuk tawar menawar saja harus ada adu mulut dulu”<sup>2</sup>

Atas dasar hal ini pula maka Perda Nomor 13 Tahun 2014 tersebut dibuat. Perda ini dibuat untuk melindungi pasar-pasar tradisional dari maraknya toko modern supaya pasar tradisional dapat bertahan dari berkembangnya zaman. Disperindag Kabupaten Situbondo dalam mengimplementasikan perda tersebut melakukan peremajaan dan revitalisasi pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Situbondo. Ini dilakukan untuk menghilangkan persepsi buruk masyarakat tersebut terkait dengan pasar tradisional. Revitalisasi dan peremajaan pasar tradisional saat ini penting untuk dilakukan karena saingan dari pasar tradisional baru toko modern. Di Kabupaten Situbondo belum ada mall sehingga

---

<sup>2</sup> Mas Pri wartawan Radar Situbondo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 November 2018 pada pukul 09.00 WIB di Kantor Radar Situbondo

pasar tradisional masih bisa bertahan dengan lama jika penataan tersebut dilakukan dengan baik dan tidak disepelakan karena jika sudah terdapat mall di Kabupaten Situbondo maka pekerjaan berat bagi Disperindag untuk dapat membuat pasar tradisional bersaing. Jika sudah ada mall tetapi keadaan pasar masih tetap seperti dulu dan persepsi masyarakat belum berubah maka bisa dipastikan masyarakat akan lebih berbelanja di mall meskipun harga yang dibayarkan lebih mahal.

Penataan yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo di Pasar Mimbaan Baru dilakukan pada tahun 2017. Pada tahun 2016 tidak ada penataan yang dilakukan karena menurut Bapak Prima selaku Kepala Seksi Pengelolaan Pasar, di tahun tersebut tidak dilakukan penataan apapun di Pasar Mimbaan Baru karena di tahun tersebut hanya dilakukan pendataan terkait para pedagang yang ada disana. Penataan akan tetapi tetap dilakukan di pasar lain, tidak di Pasar Mimbaan Baru. Pendataan pedagang di Pasar Mimbaan Baru dilakukan setelah Disperindag menerima tanggung jawab terkait pasar. Pendataan ini terkait dengan izin para pedagang yang ada disana termasuk ruko-ruko yang ada disana.

Peremajaan Pasar Mimbaan Baru, baru dilakukan pada tahun 2017. Peremajaan yang dilakukan pun hanya peremajaan kecil bukan peremajaan besar-besaran. Peremajaan yang dilakukan di tahun 2017 adalah perbaikan terkait atap kanopi di tempat bagian tengah pasar. Atap ini dilakukan perbaikan menurut Bapak Prima karena memang mendesak dan harus segera diganti mengingat umur dari kanopi tersebut yang sudah lama dan tua sehingga mendesak untuk segera diganti sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu tidak terjadi peremajaan atau revitalisasi apapun lagi di dalam Pasar Mimbaan Baru selama tahun 2016



sampai dengan tahun 2017. Pergantian yang bisa dibilang kecil karena memang hanya kanopi di bagian tengah pasar saja yang diganti dan Disperindag Kabupaten Situbondo tidak melakukan perbaikan apa-apa lagi di tahun 2017 tersebut untuk Pasar Mimbaan Baru.

Terkait dengan pengelolaan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Situbondo, Disperindag Kabupaten Situbondo mengelola dalam bentuk penarikan retribusi pelayanan pasar yang ada disana. Menurut Bapak Prima, tugas pengelolaan yang dilakukan oleh Disperindag terkait pengelolaan pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Situbondo adalah penarikan retribusi pelayanan pasar. Pengelolaan pasar terbatas di penarikan retribusi pelayanan pasar karena retribusi pelayanan pasar yang akan dikelola oleh Disperindag yang nantinya manfaatnya digunakan untuk salah satunya sebagai pembangunan yang ada di pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Situbondo.

Pengelolaan pasar terkait dengan retribusi pelayanan pasar tercantum di dalam Perda nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang merupakan aturan baru karena sebelumnya diatur di dalam Perda nomor 24 tahun 2011. Selain itu peraturan tersebut diturunkan menjadi Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 32 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi pelayanan pasar sendiri ditarik kepada para pedagang yang di pasar supaya mereka bisa berdagang disana dan supaya mereka mendapatkan izin untuk berjualan di pasar tradisional. Retribusi pelayanan pasar sendiri ditujukan untuk pemasukan daerah yang nantinya

digunakan untuk pembangunan-pembangunan yang ada di daerah termasuk pembangunan pasar supaya pasar dapat menjadi lebih baik.

Di dalam Perda tersebut, dicantumkan besaran dari setiap retribusi pelayanan pasar yang ditarik kepada para pedagang yang berdagang di pasar tradisional, termasuk Pasar Mimbaan Baru. Untuk penarikan retribusi kios permanen adalah Rp. 700 /M<sup>2</sup> yang ditarik setiap hari. Kios disini adalah tempat pedagang yang memiliki atap dan dinding pemisah antara satu dengan lainnya. Sedangkan untuk retribusi los adalah Rp. 600/M<sup>2</sup> yang ditarik setiap hari. Los disini ada tempat berjualan pedagang yang beratap tetapi tidak dipisahkan dengan dinding satu sama lain. Sementara untuk ruko sendiri menurut Bapak Prima menggunakan perda berbeda, yaitu tentang pemanfaatan kekayaan daerah. Ruko untuk retribusi nya sendiri adalah Rp. 220.000/M<sup>2</sup>/lantai yang dibayarkan oleh pemilik ruko per tahun. Penarikan retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang kios dan los dilakukan oleh petugas pasar yang diketuai oleh Kepala Pasar yaitu Bapak Junaidi. Setiap hari mereka menarik retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang, jika pedagang tutup maka tidak ditarik akan tetapi jika pedagang tutup selama 30 hari berturut-turut maka ijin pedagang akan dicabut. Setelah retribusi ditarik lalu uang retribusi pelayanan pasar setiap harinya disetor kepada kas daerah melalui nomor rekening oleh petugas pasar. Sedangkan untuk ruko, pemilik ruko langsung membayar kepada nomor rekening kas daerah setiap tahunnya.

### 5.1.2 Menganalisis Masalah Penataan dan Pengelolaan Pasar Mimbaan Baru

Pada tahun 2016, penataan tidak dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo di Pasar Mimbaan Baru. Pada tahun tersebut hanya dilakukan pendataan dan validasi data dari para pedagang yang ada di pasar tersebut. Validasi disini adalah terkait dengan data para pedagang dan perijinan para pedagang yang menurut Bapak Prima, harus diperbaharui setiap dua tahun sekali sehingga yang menjadi fokus bagi Disperindag Kabupaten Situbondo untuk Pasar Mimbaan Baru adalah terkait validasi data. Tanggung jawab penataan dan pengelolaan yang diserahkan kepada Disperindag Kabupaten Situbondo pada tahun 2015 membuat mereka lebih memilih fokus untuk memvalidasi data di Pasar Mimbaan Baru.

Pada tahun 2016 juga pembangunan tidak dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo di Pasar Mimbaan Baru karena menurut Bapak Prima, pasar lain masih lebih membutuhkan pembangunan dibandingkan dengan Pasar Mimbaan Baru yang dirasa masih belum membutuhkan pembangunan secara besar-besaran maupun yang berskala kecil. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Prima :

“Untuk tahun 2016, kita memang tidak melakukan pembangunan apa-apa di Pasar Mimbaan Baru karena memang APBD tahun 2016 lebih di konsentrasikan untuk Pasar Panarukan yang lebih butuh dibandingkan dengan Pasar Mimbaan ya. Dan untuk DAK nya juga dialokasikan untuk pasar-pasar lain yang lebih butuh”<sup>3</sup>

Bisa dilihat bahwa permasalahan utama dari penataan yang ada di Pasar Mimbaan Baru adalah bahwa Pasar Mimbaan tidak menjadi prioritas dari

---

<sup>3</sup> Bapak Prima selaku Kepala Seksi Pengelolaan Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 November 2018 pada pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo

Disperindag Kabupaten Situbondo untuk dilakukan perbaikan baik itu peremajaan ataupun revitalisasi sehingga pada tahun 2016 hanya ada pendataan di Pasar Mimbaan Baru, tidak ada penataan apapun. Pasar Mimbaan Baru memang belum menjadi prioritas dari Disperindag Kabupaten Situbondo dalam melakukan penataan. Mereka menganggap Pasar Mimbaan Baru masih cukup layak sehingga belum membutuhkan perhatian khusus dalam melakukan penataan. Mereka justru lebih berfokus kepada pasar lain di tahun tersebut juga yaitu Pasar Panarukan dimana mereka membangun los-los baru untuk para pedagang. Los-los baru tersebut dibangun untuk menyeragamkan los yang ada disana. Menurut Bapak Prima, los yang ada di Pasar Panarukan lebih membutuhkan untuk dibangun kembali ketimbang Pasar Mimbaan Baru yang menurut mereka masih belum waktunya untuk dibangun kembali. Selain Pasar Panarukan, pasar lain yang menjadi perhatian Disperindag pada tahun 2016 adalah Pasar Kapongan dimana pasar tersebut diproyeksikan untuk menjadi pasar yang berstandar nasional atau pasar SNI. Dari tahun 2016 sampai tahun 2017 fokus Disperindag adalah untuk membuat Pasar Kapongan menjadi pasar ber SNI. Bukan Pasar Mimbaan Baru yang merupakan pasar besar dan berada di tengah kota yang menjadi konsenterasi mereka akan tetapi Pasar Kapongan yang dianggap lebih layak untuk menjadi pasar ber SNI dan lebih fokus dilakukan penataan.

Pasar ber SNI merupakan pasar dengan standar Indonesia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pasar ini merupakan pasar tradisional yang sudah memiliki standar tinggi hampir seperti mall-mall yang ada saat ini. Ini dilakukan untuk membuat pasar tradisional bisa bersaing dengan mall dan supermarket dan

mengikuti perkembangan jaman yang ada saat ini. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh pasar ber SNI adalah memiliki ruang bermain anak dan ruang menyusui bagi ibu-ibu yang ingin menyusui. Di Kabupaten Situbondo, Pasar Kapongan dipilih untuk diusulkan menjadi pasar ber SNI karena sudah memiliki beberapa kriteria syarat tersebut sehingga tidak perlu membangun dar awal tinggal penambahan saja.

Hal yang sangat disayangkan karena Pasar Mimbaan Baru merupakan pasar besar dan bisa dibilang pasar utama di dalam kota karena menjual berbagai macam keperluan yang ada mulai dari bahan pokok sehari-sehari hingga keperluan non makanan ada di dalam pasar tersebut. Lengkapnya jumlah pedagang membuat Pasar Mimbaan Baru bisa dijadikan sentral dari pasar-pasar yang lain karena memang kapasitasnya yang besar. Selain kios dan los yang ada disana, di pasar tersebut juga terdapat ruko-ruko yang berjualan bermacam-macam kebutuhan yang ada di masyarakat. Besarnya pasar dan banyaknya pedagang yang menggantungkan hidup di pasar tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Selain itu juga jika penataan dan pengelolaan di Pasar Mimbaan Baru bisa di maksimalkan maka bisa menjadi tempat tujuan para wisatawan untuk berbelanja karena pasar tersebut berada di jalan utama yang akan mengarah ke Banyuwangi. Jika melihat contoh dari Pasar Lawang di Kabupaten Malang yang banyak dikunjungi wisatawan untuk berbelanja oleh-oleh, maka Pasar Mimbaan baru bisa mencontoh hal tersebut karena pasar tersebut merupakan pasar besar di kabupaten Situbondo.

Pada tahun 2017, penataan yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo di Pasar Mimbaan Baru baru sekedar mengganti kanopi yang ada di



tempat bagian tengah pasar. Hanya mengganti atap kanopi adalah penataan yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo untuk Pasar Mimbaan Baru di tahun 2017. Menurut Disperindag Kabupaten Situbondo, atap kanopi di tempat bagian tengah pasar merupakan hal yang paling penting untuk segera di ganti di Pasar Mimbaan Baru sehingga dilakukan perbaikan di atap kanopi saja di tahun 2017 tersebut. Disperindag beranggapan bahwa untuk sektor lainnya Pasar Mimbaan Baru belum membutuhkan peremajaan lagi sehingga masih tetap dipertahankan dan hanya melakukan perbaikan di atap kanopi bagian tengah pasar.

Akan tetapi penataan yang tidak kalah paling pentingnya menurut Mas Pri sebagai wartawan Radar Situbondo adalah terkait dengan kebersihan dan kenyamanan yang ada di Pasar Mimbaan Baru. Menurut beliau, ada sebagian masyarakat yang mengeluhkan tentang kebersihan di Pasar Mimbaan Baru, mereka menganggap bahwa Pasar Mimbaan Baru masih merupakan pasar yang kumuh dan kurang bersih sehingga membuat masyarakat kurang nyaman ketika berbelanja disana. Kumuh dalam artian masih terdapat genangan air dimana-dimana meskipun tidak hujan karena penggunaan air oleh para pedagang. Air yang menggenang tidak langsung terserap sehingga menggenang di lantai-lantai pasar dan mengakibatkan becek. Selain itu tempat sampah yang ada di Pasar Mimbaan Baru juga dibiarkan menumpuk tidak cepat dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPU) sehingga membuat bau yang tidak sedap dan lalat dimana-dimana. Lalat yang banyak sangat mengganggu apalagi jika sampai hinggap di bahan-bahan makanan yang dijual oleh para pedagang sehingga membuat para pembeli menjadi jijik. Padahal kenyamanan merupakan salah satu faktor utama yang dipikirkan oleh masyarakat dalam

berbelanja di pasar tradisional utamanya adalah Pasar Mimbaan Baru yang merupakan pasar besar di Kabupaten Situbondo.

Selain masalah masalah kenyamanan tersebut, masalah lain yang seharusnya diperhatikan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo adalah tentang estetika yang ada disana. Menurut Mas Pri terkadang terlihat wahan mainan yang diletakkan sembarangan oleh pemiliknya dan hanya ditutup terpal begitu saja jika tidak digunakan. Hal ini tentu saja mengganggu pemandangan dan estetikanya karena terkesan tidak rapi dan pasarnya terlihat berantakan. Padahal ini juga masalah yang harus diperhatikan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo terkait dengan penataan di Pasar Mimbaan baru seperti menyediakan tempat untuk wahana permainan tersebut sehingga pasar tersebut terlihat rapi dan enak di pandang yang juga bisa mempengaruhi kenyamanan para pembeli.

Untuk permasalahan pengelolaan sendiri di Pasar Mimbaan Baru yang merupakan penarikan retribusi pelayanan pasar adalah jumlah pedagang yang tiap tahun makin menurun. Dimulai ketika Pasar Mimbaan Baru masih dikelola oleh DPKAD Kabupaten Situbondo sampai saat ini berpindah pengelola menjadi Disperindag Kabupaten Situbondo masih menjadi permasalahan yang cukup serius yang dihadapi dalam melakukan penarikan retribusi pelayanan pasar yang ada disana. Pedagang disini adalah pedagang yang memiliki kios dan los di seluruh pasar mulai dari lantai satu sampai dengan lantai dua yang mayoritas diisi dengan pedagang tekstil atau pakaian dan pedagang jam tangan. Menurunnya jumlah pedagang tentu saja berpengaruh terhadap penarikan retribusi pasar karena

pedagang yang semakin sedikit tentu saja juga berarti pendapatan dari retribusi pelayanan pasar juga sedikit dan menghambat dari penarikan retribusi itu sendiri.

Menurunnya jumlah pedagang tiap tahunnya ternyata juga di perharikan oleh wartawan Radar Situbondo, Mas Pri beliau mengatakan bahwa pedaganng yang paling terlihat jika angkanya menurun adalah yang berdagang di lantai dua yaitu bagian pakaian dan kebanyakan berdagang jam tangan. Banyak dari kios-kios mereka yang tutup dan tidak berpenghuni cukup lama. Hal yang cukup disayangkan karena jika mereka tutup dan tidak berjualan lagi cukup lama maka Disperindag tidak bisa menarik retribusi pelayanan kepada mereka dan tidak bisa mendapatkan pendapatan dari sana. Masyarakat menurut Mas Pri lebih memilih untuk berbelanja dikawasan lantai satu saja dan malas untuk berbelanja di lantai dua karena masih harus naik tangga sehingga membuat pedagang sepi dan akhirnya tutup.

**Tabel 5.1**  
**Jumlah Pedagang Pasar Mimbaan Baru Tahun 2014-2017**

No	Tahun	Jumlah Pedagang
1	2014	256 pedagang
2	2015	249 pedagang
3	2016	200 pedagang
4	2017	105 pedagang

Sumber : Data diolah oleh penulis 2018

Dari data diatas bisa dilihat bahwa jumlah pedagang yang berdagang di Pasar Mimbaan Baru terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Data yang didapat oleh peneliti adalah data yang diberikan oleh Bapak Junaidi selaku Kepala

Pasar Mimbaan Baru ketika peneliti mewawancarai beliau. Pedagang yang berjualan di Pasar Mimbaan Baru bisa dilihat menurun tiap tahunnya dan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, pedagang masih tetap mengalami penurunan jumlahnya. Tentu bukan suatu hal yang baik jika dilihat karena pendapatan retribusi pasarnya pun akan tersendat jika dibiarkan begitu saja.

Tahun 2014 jumlah pedagang di Pasar Mimbaan Baru adalah sejumlah 256 pedagang. Angka yang bisa dibilang cukup banyak karena masih menyentuh angka dua ratus pedagang yang tersebar kedalam berbagai macam jenis pedagang mulai dari pedagang yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari sampai dengan pedagang yang menjual asesoris seperti jam tangan. Pada tahun 2015 angka ini menurun cukup banyak yaitu menjadi sejumlah 249 pedagang yang berarti selama setahun itu pedagang berkurang sejumlah 7 pedagang. Pada tahun 2016 lagi-lagi jumlah pedagang juga berkurang yaitu menjadi sejumlah 200 pedagang. Angka melorot cukup besar yang berarti selama tahun 2016, pedagang yang gulung tikar di Pasar Mimbaan Baru sejumlah 49 orang. Lalu pada tahun 2017, pedagang yang ada di Pasar Mimbaan Baru sejumlah 105 pedagang. Lagi-lagi penurunan yang cukup signifikan terjadi yaitu selama tahun 2017, para pedagang yang gulung tikar sejumlah 95 orang. Angka yang cukup banyak di tahun 2017 sehingga membuat Pasar Mimbaan Baru terlihat sepi pedagang.

Fenomena ini menurut Bapak Junaidi selaku kepala pasar terjadi karena sepiunya pembeli yang datang ke Pasar Mimbaan Baru, menurut Bapak Juanidi :

“Ya penyebabnya banyak yang tutup memang karena pasar ini sepi pembeli mas, sepi dan tidak seramai pasar-pasar lainnya. Kenapa sepi ya karena kan pasar ini memang penjualnya kalau jualan siang, mulai jam 6

pagi atau jam 7 baru jualan, sedangkan pasar lain kan lebih pagi jadi pembelinya ya pembeli khusus yang bangunnya siang dan disini harganya sedikit lebih mahal daripada pasar lain.”<sup>4</sup>

Sepinya pembeli memang menyebabkan pemasukan pendapatan dari retribusi pelayanan pasar di Pasar Mimbaan Baru menjadi tersendat apalagi jika melihat status Pasar Mimbaan Baru yang merupakan pasar besar sangat disayangkan jika tidak dimaksimalkan untuk ditarik retribusi pelayanan pasarnya. Sepinya pembeli memang menurut Bapak Juanidi disebabkan oleh banyak hal yang diantaranya adalah Pasar Mimbaan Baru memiliki konsumennya sendiri karena pasar ini beroperasi relatif lebih siang jika dibandingkan dengan pasar-pasar tradisional lainnya sehingga konsumen yang ingin berbelanja lebih pagi memilih untuk berbelanja di pasar lainnya. Selain itu juga tempat Pasar Mimbaan Baru yang diapit oleh dua pasar tradisional lain mengakibatkan sepi pembeli.

Pasar Mimbaan Baru meskipun terletak di tengah kota akan tetapi diapit oleh dua pasar tradisional lainnya. Di sebelah selatan ada Pasar Senggol yang berjarak  $\pm 1$  km dari Pasar Mimbaan Baru dan beroperasi lebih pagi dari Pasar Mimbaan Baru serta di sebelah timur ada Pasar Panji yang juga merupakan pasar besar sehingga masyarakat dari daerah timur lebih memilih untuk berbelanja di Pasar Panji tersebut. Jarak antar Pasar Mimbaan Baru dengan Pasar Panji sendiri sekitar  $\pm 5$  km. Jarak yang relatif berdekatan dan harga yang menurut Bapak Juanidi

---

<sup>4</sup> Bapak Juanidi selaku Kepala Pasar Mimbaan Baru, wawancara dilakukan pada tanggal 8 November 2018 di Kantor UPTD Pasar Mimbaan Baru



di Pasar Mimbaan Baru sedikit lebih mahal membuat para pembeli lebih memilih untuk berbelanja di Pasar Senggol atau Pasar Panji.

Jarak antar pasar yang relatif berdekatan ini memang sudah terjadi sejak dahulu semenjak pertama kali pasar-pasar ini dibangun. Utamanya Pasar Senggol dengan Pasar Mimbaan Baru yang memang relatif sangat berdekatan. Ini terjadi karena diawal Pasar Senggol yang dibangun terlebih dahulu tahun 1960an dirasa tidak bisa menampung jumlah pedagang yang membludak. Karena lahannya yang terbatas lantas pemerintah membangun pasar lagi yang lebih baru dan lebih luas dari Pasar Senggol tersebut. Pembangunan Pasar Mimbaan Baru yang berdekatan dengan Pasar Senggol memang disengaja karena para pedagang tidak mau jika dipindah terlalu jauh, maka dari itu dibangun Pasar Mimbaan Baru untuk menampung pedagang Pasar Senggol yang tidak kebagian tempat. Menurut Bapak Prima tidak ada persaingan antar pasar tradisional karena memang Pasar Mimbaan baru memiliki pangsa pasarnya sendiri yaitu orang-orang yang berbelanja siang sedangkan Pasar Senggol untuk orang-orang yang berbelanja pagi.

Bapak Juanidi sebagai kepala pasar tidak bisa memastikan apakah para pedagang yang akhirnya tutup tersebut lebih memilih untuk berjualan di pasar lain atau karena memang sudah tidak berjualan lagi. Hal ini beliau katakan memang karena setiap pedagang yang tutup tidak menjelaskan kepada petugas pasar alasan mengapa mereka tidak berjualan disana lagi sehingga para petugas tidak bisa mengetahui alasan pasti kemana para pedagang tersebut. Akan tetapi menurut Bapak Juanidi, bisa jadi para pedagang tersebut memang pindah ke pasar lain karena merasa Pasar Mimbaan Baru sepi dan tidak sabar menunggu pelanggan.

Fakta bahwa Pasar Mimbaan baru diapit oleh dua pasar lainnya yang berdekatan memang bisa membuat para pedagang untuk pindah dan memilih untuk berjualan di pasar-pasar tersebut. Pasar-pasar tersebut adalah pasar yang aktif mulai pagi dan ramai dikunjungi sejak pagi, tidak seperti Pasar Mimbaan Baru yang ramainya lebih siang.

Salah satu penyebab dari fluktuatifnya jumlah retribusi pelayanan pasar di Pasar Mimbaan Baru memang disebabkan oleh banyaknya penjual yang tutup sehingga membuat penarikan retribusi pelayanan pasar tersebut tersendat dan membuat penerimaan retribusi pelayanan pasar sendiri tidak stabil dari tahun ke tahun. Seperti data yang diperoleh oleh peneliti dibawah ini :

**Tabel 5.2**  
**Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2015-2017**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2015	213.230.750	226.603.000
2	2016	377.157.000	211.828.200
3	2017	297.845.000	175.824.000

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis 2018

Jika dilihat dari data diatas maka retribusi pelayanan pasar pada tiap tahunnya mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan bahkan tidak mencapai targetnya pada tahun 2016 dan pada tahun 2017. Pada tahun 2015 seperti data diatas dapat dilihat bahwa realisasi dari retribusi pelayanan pasar mencapai targetnya. Realisasi pada tahun 2015 tersebut adalah Rp. 226.603.000 dari target awal tahun yang sejumlah Rp. 213.230.750. Sedangkan untuk tahun

setelahnya yaitu tahun 2016, terjadi penurunan dan bahkan tidak mencapai target yaitu sejumlah Rp.211.828.200 dari target awal tahun Rp.377.157.000. Hal ini terus berlanjut di tahun setelahnya yaitu pada tahun 2017 dimana realisasinya sebesar Rp.175.824.000 dari target awal tahun Rp. 297.845.000. Banyaknya pedagang yang tutup membuat pendapatan dari retribusi pelayanan pasar di Pasar Mimbaan Baru menjadi terhambat bahkan tidak mencapai target.

Akan tetapi jika dilihat dari data-data tentang penurunan retribusi pelayanan pasar di Pasar Mimbaan Baru diatas, jika dihitung lebih jauh lagi maka sebenarnya penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Mimbaan Baru tahun 2017 jika dirata-rata lebih besar dari tahun 2015. Jika penerimaan retribusi dibagi dengan jumlah pedagang pada tahun 2017, maka rata-rata penerimaan retribusi di tahun tersebut adalah sejumlah 1,6 juta rupiah per pedagang. Dibandingkan dengan tahun 2015 yang sejumlah sembilan puluh ribu rupiah per pedagang. Perbandingan yang berbeda jauh sekali jika dibandingkan tahun 2015 dengan tahun 2017 yang mengalami penurunan. Pemasukan yang sebenarnya besar tiap pedagangnya bagi penerimaan retribusi pasar.

Akan tetapi hal ini bisa terjadi karena perubahan perda yang berlaku untuk retribusi pelayanan pasar sendiri. Perda awal tentang retribusi pelayanan pasar adalah Perda nomor 24 tahun 2011. Lalu setelah pengelolaan Pasar Mimbaan Baru dipegang oleh Disperindag Kabupaten Situbondo, perda tersebut berganti menjadi Perda nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Perda tahun 2011 sebelumnya menetapkan jumlah retribusi pelayanan pasar adalah Rp. 500,-/m<sup>2</sup>

untuk kios yang ada disana dan Rp. 400,-/m<sup>2</sup> untuk los yang ada disana. Untuk ruko tetap perda yang digunakan berbeda dengan perda retribusi pelayanan pasar.

Naiknya retribusi pelayanan pasar yang ada ini bisa jadi memberatkan para pedagang. Memberatkan jika memang pasar tempat mereka berjualan sepi pembelinya seperti di Pasar Mimbaan Baru. Naiknya tarif retribusi pelayanan pasar ini juga bisa menjadi salah satu alasan dari banyaknya para pedagang yang tutup di Pasar Mimbaan. Memang setiap pasar memiliki angka tarif yang sama karena sudah ditetapkan oleh perda dan harus dipatuhi oleh semuanya, akan tetapi jika Pasar Mimbaan Baru yang memang menurut pengakuan kepala pasarnya lebih sepi dibandingkan dengan pasar lain, maka memang bisa menjadi alasan kenapa mereka lebih memilih untuk tidak berjualan lagi disana dan memilih untuk berjualan di pasar lain. Untuk sehari-hari saja pemasukan mereka bisa dibilang kecil karena sepi pembeli, mereka pun harus tetap membayar retribusi yang naik sehingga memuat mereka untuk pindah ke pasar yang lebih ramai supaya berkurang banyak pemasukan mereka.

Sepinya pembeli memang dirasakan untuk para pedagang yang berada di lantai dua sehingga membuat mereka banyak yang tutup. Untuk para pembeli di lantai bawah menurut Bapak Prima memang tidak sepi, malah terkesan wajar jika melihat dari fungsinya Pasar Mimbaan Baru sebagai pasar siang. Akan tetapi masalah memang muncul untuk pedagang di lantai dua yang berjualan baju dan jam tangan. Sepinya pembeli yang membeli ke lantai dua membuat para pedagang akhirnya memilih untuk tutup saja atau ditnggal begitu saja kios mereka karena mereka juga harus tetap membayar retribusi jika mereka tetap berjualan di Pasar

Mimbaan Baru. Terlebih lagi menurut Bapak Prima, para pedagang di lantai dua kebanyakan adalah para pedagang yang merantau dari kota lain, sehingga jika pemasukan mereka sedikit mereka lebih memilih untuk tidak berjualan lagi disana.

Banyaknya pedagang yang tutup di lantai dua ini akhirnya memang sangat berpengaruh dalam penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Mimbaan Baru disana. Dengan menempati kios yang besar maka pemasukan retribusi dari pedagang di lantai dua lebih besar dari pada di lantai bawah yang memang kebanyakan hanya pedagang dengan los saja yang tidak terlalu besar, masih lebih besar pedagang dengan kios di lantai dua. Sehingga permasalahan terbesar Pasar Mimbaan Baru adalah banyaknya pedagang yang tutup di lantai dua

Disini bisa dilihat bahwa identifikasi dari penataan yang dilakukan oleh Disperindag kurang tepat sasaran. Pembangunan hanya dilakukan di lantai bawah yaitu dibangun kanopi untuk para pedagang di lantai bawah. Padahal masalah terbesar ada di lantai dua dimana para pedagangnya menyumbang lebih banyak pemasukan untuk retribusi pasar yang ada disana. Bisa dilihat bahwa penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Mimbaan Baru tahun 2017 menurun drastis dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2015. Hal ini selaras dengan jumlah pedagang yang juga menurun di tahun 2017. Para pedagang yang tutup ini kebanyakan adalah pedagang di lantai dua yang memang menyumbang retribusi lebih besar. Sehingga ketika mereka tutup maka pemasukan retribusi juga akan berkurang karena kios-kios yang ada di lantai dua menjadi kosong. Kios-kios yang seharusnya menjadi pemasukan terbesar dari retribusi pelayanan pasar justru tutup sehingga tidak bisa ditarik retribusinya. Disperindag seharusnya lebih teliti lagi



dalam melihat permasalahan yang ada karena memang yang lebih krusial untuk ditata adalah pedagang di lantai dua karena bisa dioptimalkan pemasukannya.

### **5.1.3 Mendeskripsikan dan Standarisasi Kegiatan**

Pada Perda Nomor 13 Tahun 2014 tertuang bahwa penataan yang dilakukan adalah tentang pemberdayaan pasar tradisional dan pemberdayaan yang dilakukan adalah revitalisasi dan peremajaan pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing dengan toko-toko modern yang ada saat ini di Kabupaten Situbondo. Revitalisasi pasar merupakan suatu upaya untuk menghidupkan pasar yang sempat redup dan mulai ditinggalkan para pembelinya. Revitalisasi ini bisa merupakan perombakan besar-besaran yang ada di pasar tradisional untuk membuat pasar tersebut kembali menggeliat dan menjadi tujuan utama masyarakat untuk berbelanja di pasar tersebut. Sedangkan peremajaan pasar adalah suatu upaya kecil untuk mengganti atau memperbaiki sebagian bagian yang ada di pasar tradisional. Hal ini dilakukan karena terjadi sebagian dari bagian pasar yang memang diperlukan untuk diganti.

Pada tahun 2017, penataan yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo untuk Pasar Mimbaan Baru adalah peremajaan yang dilakukan disana. Peremajaan disini adalah perbaikan sebagian bagian yang ada di Pasar Mimbaan Baru. Peremajaan dilakukan disana karena memang ada bagian yang sangat diperlukan untuk diganti. Peremajaan Pasar Mimbaan Baru tahun 2017 adalah mengganti atap kanopi yang ada di bagian tengah pasar. Atap ini memang harus segera diganti karena memang kondisinya yang sudah tidak layak lagi dan sudah tidak pernah diganti dari dulu. Penggantian atap kanopi di bagian tengah pasar penting untuk dilakukan karena disana merupakan pusat dari aktivitas yang ada di

Pasar Mimbaan Baru. Atap ini hanya menaungi yang ada di bawahnya yaitu para pedagang di lantai satu sedangkan para pedagang di lantai dua memiliki atap sendiri.

Berdasarkan dengan penuturan dari Bapak Junaidi selaku kepala pengelola pasar. Standarisasi dari penggantian atap kanopi ini adalah penggantian dari atap sepanjang 30 meter yang membujur dari arah utara ke selatan pasar. Selain itu bentuk dari atap kanopi ini sendiri ada setengah lingkaran atau berbentuk lengkungan. Bentuk ini dipilih untuk mengakomodir atap yang perlu diganti saja supaya tidak perlu mengganti secara keseluruhan yang atapnya memang masih memiliki kualitas yang masih bagus. Selain itu atap yang berbentuk lengkung dipilih untuk membuat para pedagang dan masyarakat merasa nyaman berada dibawahnya ketika melakukan kegiatan jual beli karena atap akan terlihat jauh dan membuat sirkulasi udara menjadi lebih lancar pasar terlihat lebih terang dan tidak gelap. Diameter dari lengkungan itu sendiri adalah 9 meter. Atap yang cukup besar untuk mengakomodir kegiatan yang ada di bagian tengah pasar.

Untuk pengelolaan pasar sendiri yang merupakan penarikan dari retribusi pelayanan pasar, tercantum di Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang ditarik oleh daerah setempat yang dimana pasar tradisional itu berada sebagai pembayaran yang dilakukan oleh para pedagang yang ada di pasar tersebut supaya diberikan izin oleh pemerintah daerah supaya mereka bisa berjualan di pasar tersebut. Retribusi pelayanan pasar dibayarkan oleh para pedagang kepada petugas pasar yang ada di tiap-tiap pasar. Setiap pasar terdapat unit tersendiri yang merupakan kepanjangan

tangan dari Disperindag Kabupaten Situbondo untuk mengelola pasar dan menarik dari retribusi pelayanan pasar yang ada. Untuk di Pasar Mimbaan Baru sendiri unit tersebut dikepalai oleh Bapak Junaidi yang bertindak sebagai Kepala Pengelola Pasar.

Retribusi pelayanan pasar ditarik setiap harinya oleh para petugas yang berwenang disana kepada para pedagang yang memiliki los ataupun kios berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 32 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar. Para pedagang yang ada di lantai satu ataupun lantai dua semuanya yang memiliki los atau kios ditarik retribusinya oleh petugas setiap hari tanpa terkecuali. Standar operasional yang berlaku memang mewajibkan para pedagang yang berdagang untuk membayar retribusinya setiap hari. Jika mereka tidak sedang berjualan atau tutup di hari tersebut maka retribusinya tidak ditarik, retribusi baru ditarik ketika mereka sedang berjualan dan ketika mereka lebih dari tiga puluh hari berturut-turut tidak berjualan maka izin berjualan mereka akan dicabut. Retribusi yang ditarik untuk setiap pedagang yang memiliki kios atau los sama, tidak melihat dari dagangan apa yang dijual akan tetapi dilihat dari kios atau los yang mereka miliki. Sedangkan untuk ruko sendiri, para penjual diwajibkan untuk membayarkan retribusinya setiap setahun sekali kepada pemerintah melalui Disperindag Kabupaten Situbondo akan tetapi mereka membayar langsung ke kas daerah, tidak ditarik oleh petugas.

#### 5.1.4 Mengukur Perubahan Jumlah Pembeli

Tidak adanya pembangunan apapun di tahun 2016 di Pasar Mimbaan Baru dan baru ada peremajaan di pasar tersebut pada tahun 2017 membuat para pedagang yang berjualan disana tidak merasakan perubahan apapun yang terjadi terhadap mereka terlebih jika melihat jumlah pembeli yang ada. Menurut mereka, jumlah pembeli yang ada selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tidak terjadi perubahan apapun. Tidak ada peningkatan ataupun penurunan jadi cenderung stabil dari jumlah pembeli yang datang kesana dan membeli barang dagangan mereka. Mereka mengakui bahwa memang biasanya waktu paling ramai dari mereka adalah ketika hari raya idul fitri. Di saat itu memang pembeli yang datang ke Pasar Mimbaan Baru lebih ramai dari biasanya akan tetapi ketika hari raya sudah lewat maka jumlah pembeli yang datang akan kembali seperti biasanya lagi.

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2017 pun tidak dirasakan perubahannya terhadap daya beli masyarakat karena menurut Ibu Sukiyah yang sudah puluhan tahun berjualan di Pasar Mimbaan Baru, beliau berjualan pisang setiap harinya dan mengatakan bahwa :

“Gak ada perubahan apa-apa mas meskipun sudah diganti, ya memang pembelinya kan khusus itu-itu aja dan segitu-gitu aja yang beli. Memang pembeli saya kan biasanya orang yang mau *kula'an* pisang mas buat dijual lagi jadi ya itu-itu aja”<sup>5</sup>

Hal yang sama juga dirasakan oleh Bapak Ali sebagai pedagang kerajinan bambu yang berjualan di Pasar Mimbaan Baru lebih dari 2 tahun ini. Beliau berjualan di bagian dalam pasar dan mengatakan bahwa memang perubahan yang

---

<sup>5</sup> Ibu Sukiyah pedagang buah pisang di Pasar Mimbaan Baru. Wawancara dilakukan di kios Ibu Sukiyah pada tanggal 9 November 2018

terjadi tidak terlalu terasa karena pembeli yang datang cenderung tetap. Hanya perubahan pemandangan saja yang beliau rasakan yaitu setelah atapnya diganti jadi pasar terlihat lebih terang dari sebelumnya yang terkesan gelap karena memang atapnya yang kurang memadai. Selain itu beliau juga merasakan perubahan pengelolaan pasar yang sejak dipegang oleh Disperindag Kabupaten Situbondo yang dirasakan sekarang lebih teratur dalam penarikan retribusniya. Akan tetapi jika dari segi pembeli, beliau beranggapan bahwa jumlahnya tetap sama dari dahulu hingga sekarang dan beliau tidak merasakan perubahan.

Ibu Sukiyem yang berjualan buah-buahan di dalam pasar sejak tahun 2010 tidak merasakan perubahan pembeli meskipun atap di tempat dia berjualan sudah diganti. Atap kanopi yang diganti tepat berada diatas beliau berjualan selama ini di dalam pasar. Beliau mengaku memang tidak ada perubahan pembeli dalam hal jumlah pembeli karena setelah atap itu diganti pun pembeli yang membeli ke tempat beliau berjualan tetap sama dengan yang sebelum atap dibangun. Beliau mengatakan bahwa memang pasar ini lebih sepi karena memang terlalu berdekatan dengan pasar lain sehingga pasar ini bisa dibilag kalah saing selama ini.

#### **5.1.5 Menentukan Penyebab Daya Beli Masyarakat di Pasar Mimbaan Baru**

Penyebab perubahan yang terjadi disini adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dalam hal pola pembelian setelah dilaksanakannya peremajaan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo. Peremajaan yang dilakukan di Pasar Mimbaan Baru oleh Disperindag Kabupaten Situbondo sendiri dilakukan baru pada tahun 2017 sedangkan untuk tahun 2016 tidak dilakukan peremajaan apapun



dipasar tersebut. Sehingga peneliti mewawancarai pelanggan yang memang sering berbelanja di Pasar Mimbaan Baru terkait perubahan yang dirasakan setelah peremajaan atap kanopi yang dilakukan oleh Disperindag. Peneliti melakukan wawancara terhadap tiga orang pelanggan yang memang mengaku jika mereka adalah pelanggan tetap di Pasar Mimbaan Baru sehingga mengetahui bagaimana keadaan pasar sebelum dan setelah dilakukan peremajaan.

Ibu Sudarsih yang peneliti wawancarai pertama mengaku jika beliau sering berbelanja di pasar tersebut. Minimal beliau berbelanja di pasar tersebut seminggu dua kali dan hanya berbelanja di pasar tersebut saja, tidak pernah berbelanja di pasar-pasar lain. Ibu Sudarsih mengakui bahwa :

“Saya sudah dari dulu kalau belanja disini mas, ya seminggu dua kalilah disini. Perubahan dak ada ya karena saya pasti belanja disini, langsung kesini aja tanpa pikir-pikir lagi meskipun agak mahal harganya. Jadi dak ada perubahan buat saya, mau dibangun atau endak karena memang saya sudah biasa disini.”<sup>6</sup>

Begitupula dengan Ibu Dini yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa sebenarnya peremajaan yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo sudah cukup bagus dan dirasa puas. Akan tetapi beliau mengatakan jika memang beliau dari dulu sudah menjadi pelanggan tetap dari penjual buah disana sehingga beliau tidak terlalu terpengaruh dengan penggantian atap kanopi yang sudah dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo. Beliau mengatakan demikian karena memang sudah dari dulu beliau menjadi pelanggan disana dan tetap

---

<sup>6</sup> Ibu Sudarsih sebagai pelanggan Pasar Mimbaan Baru. Wawancara dilakukan di Pasar Mimbaan Baru pada tanggal 21 November 2018 pada pukul 09.00 WIB

berbelanja disana meskipun dahulu atapnya sebelum diganti sudah tidak layak. Akan tetapi beliau mengaku memang setelah penggantian atap tersebut suasana menjadi lebih terang meskipun masih kurang luas wilayah pasarnya.

Sementara itu Bapak Suparno yang peneliti juga wawancarai di Pasar Mimbaan Baru mengatakan bahwa pembangunan yang ada di pasar tersebut sangat jarang dilakukan dan baru sekedar penggantian atap itu saja seingat beliau. Beliau biasa berbelanja di pasar untuk belanja grosiran yang akan beliau jual kembali. Beliau juga mengatakan bahwa pertimbangan beliau untuk berbelanja disana adalah karena sudah terbiasa belanja disana dan merupakan pelanggan lama. Beliau sendiri tidak terpengaruh terhadap pembangunan atap tersebut karena dari dulu beliau sudah merupakan pelanggan yang ada disana. Disini bisa kita lihat bahwa pelanggan lama tidak terpengaruh dengan peremajaan yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo karena mau bagaimanapun, mereka akan tetap membeli disana karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk belanja disana.

Perubahan terhadap daya beli masyarakat ini tidak terlihat di dalam peremajaan yang sudah dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo. Tiga orang pelanggan lama yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa memang mereka sudah terbiasa untuk berbelanja disana. Mereka tidak terpengaruh terhadap peremajaan yang sudah dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo karena mereka sudah terbiasa untuk berbelanja di Pasar Mimbaan Baru dan mengatakan tidak pernah berbelanja di pasar lainnya. Bisa dilihat disini bahwa Pasar Mimbaan Baru memang memiliki pangsa pasarnya sendiri dan memiliki pelanggan setianya sendiri yang memang tidak terpengaruh oleh pembangunan disana yang telah

dilakukan. Para pelanggan yang merasa terganggu dengan tidak ada perbaikan dan pembenahan bisa terjadi pelanggan baru atau mereka yang jarang-jarang datang ke Pasar Mimbaan Baru karena memang Pasar Mimbaan Baru sudah memiliki pelanggan setianya sendiri.

#### **5.1.6 Menentukan Indikator Dampak**

Indikator dampak yang dilihat oleh penulis disini adalah dampak bagi pedagang yang berjualan disana dalam hal pendapatan mereka yang mereka dapatkan setelah pembangunan atap kanopi tersebut pada tahun 2017 di Pasar Mimbaan Baru. Setelah peremajaan atap kanopi yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo, pedagang yang peneliti wawancarai mengatakan memang tidak berdampak terhadap pemasukan yang mereka dapatkan setiap harinya. Pendapatan yang mereka dapatkan sebelum dan sesudah pembangunan atap kanopi tersebut masih sama saja dan tidak ada peningkatan ataupun penurunan. Adanya peningkatan hanya terjadi di saat hari raya idul fitri akan tetapi setelah itu pendapatan mereka tetap seperti biasanya. Meskipun tiga pedagang yang peneliti wawancarai tidak mau menjabarkan berapa pendapatan mereka perharinya akan tetapi mereka mengaku bahwa pendapatan mereka tetap setelah peremajaan atap kanopi yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo.

Hal ini bisa dimaklumi karena memang peremajaan atap kanopi yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo tidak membawa perubahan terhadap jumlah pembeli yang datang. Memang tidak ada data pasti mengenai jumlah pembeli yang datang per harinya ke pasar, akan tetapi berdasarkan wawancara peneliti dengan para pedagang yang mengatakan bahwa tidak ada

perubahan jumlah pembeli. Maka bisa dilihat bahwa memang peremajaan ini tidak membawa dampak signifikan terhadap pemasukan pedagang. Pemasukan justru terpengaruh oleh hari raya dan memang di datangi oleh pembeli baik pelanggan tetap maupun pelanggan biasa. Akan tetapi jika hari-hari biasa maka pembeli kebanyakan adalah pelanggan setia dan beberapa pembeli biasa. Yang membuat dampak bagi pendapatan ini tidak ada.



## BAB VI

### PENUTUP

Pada bab ini, peneliti menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Setelahnya, peneliti akan memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Situbondo supaya dijadikan masukan dalam membangun pasar-pasar tradisional lainnya yang ada di Kabupaten Situbondo.

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ini, kesimpulannya adalah

Penataan yang ada di Pasar Mimbaan Baru, baru terjadi di tahun 2017 sementara itu di tahun 2016, Disperindag tidak melakukan program penataan apapun di Pasar Mimbaan Baru. Penataan yang dilakukan oleh Disperindag sendiri sebenarnya lebih kepada mendayagunakan fasilitas yang ada disana. Ini dilakukan untuk memfasilitasi para pedagang dan pembeli yang ada disana supaya lebih nyaman dalam berbelanja di Pasar Mimbaan Baru. Di tahun 2017 sendiri, pembangunan baru dilakukan di Pasar Mimbaan Baru dengan pemasangan atap kanopi yang baru di bagian tengah Pasar Mimbaan Baru. Atap yang memiliki panjang 30 meter ini dibangun untuk kenyamanan para pembeli dan pelanggan yang ada di Pasar Mimbaan Baru. Dari pembangunan yang dilakukan oleh Disperindag di Pasar Mimbaan Baru memang tidak membawa dampak apa-apa kepada para penjual ataupun kepada para pembeli yang ada. Pemasukan mereka tidak bertambah



akan tetapi juga tidak berkurang sehingga bisa dikatakan pemasukan mereka tetap. Ini khusus pedagang di lantai bawah saja karena yang merasakan dampak langsung dari pembangunan tersebut adalah pedagang di lantai bawah. Sedangkan untuk pedagang di lantai dua tidak merasakan dampak apa-apa karena kanopi itu ada dibawah tempat mereka berjualan. Tempat mereka cenderung sepi dan membuat mereka lebih memilih untuk tutup saja daripada harus membayar retribusi akan tetapi pemasukan mereka tidak seberapa. Bisa dikatakan bahwa Disperindag melakukan salah identifikasi terhadap permasalahan yang ada disana karena pedagang yang lebih membutuhkan untuk dilakukan penataan adalah pedagang di lantai dua yang memang sepi. Sedangkan untuk pedagang di lantai bawah mereka tidak sepi bahkan wajar dan sudah memiliki para pelanggannya sendiri

Selain penataan Pasar Mimbaan Baru yang dilakukan oleh Disperindag, pengelolaan juga dilakukan oleh Disperindag di Pasar Mimbaan Baru. Pengelolaan Pasar Mimbaan Baru dalam hal ini penarikan retribusi pelayanan pasar sudah sesuai dengan prosedur yang ada di dalam perda. Hanya saja hambatan terjadi adalah banyaknya pedagang yang tutup dan tidak lagi berjualan disana khususnya adalah pedagang yang ada di lantai dua. Banyaknya pedagang yang tutup diakibatkan karena sepi nya pembeli yang datang kesana. Pedagang di lantai dua banyak yang memiliki kios-kios cukup besar sehingga bisa berkontribusi untuk pemasukan dari retribusi pelayanan pasar yang ada disana. Pembeli kebanyakan adalah pelanggan lama yang sudah terbiasa datang kesana. Akibat dari sepi nya pembeli yang datang kesana adalah pedagang yang merasa berat dalam membayar retribusi pelayanan

pasar yang memang tarifnya naik sehingga lebih memilih untuk berjualan di pasar lain.

## 6.2 Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada hal yang bisa peneliti rekomendasikan untuk bisa memanfaatkan penelitian yang peneliti lakukan tentang Evaluasi Penataan dan Pengelolaan Pasar Mimbaan Baru. Adapun rekomendasi yang ditawarkan adalah :

Permasalahan yang ada di Pasar Mimbaan baru sebenarnya adalah permasalahan yang umum terjadi di pasar yang memiliki dua atau lebih lantai atau tingkat. Dengan lantai yang lebih dari satu maka pembeli kebanyakan malas untuk berbelanja di lantai atas, karena pembeli harus naik turun tangga. Ditambah lagi jika memang barang yang dibutuhkan sudah ada di lantai bawah maka pembeli akan malas untuk naik ke lantai atas. Maka dari itu Disperindag bisa lebih melihat dan memperhatikan para pedagang yang ada di lantai dua. Para pedagang ini adalah pedagang yang berjualan di kios-kios di lantai dua. Kios-kios ini memiliki nilai retribusi cukup besar ditambah dengan luas kios itu sendiri maka penerimaan dari kios-kios yang ada di lantai dua bisa dimaksimalkan untuk menambah pemasukan di retribusi pelayanan pasar.

Untuk memaksimalkan para pedagang di lantai dua tersebut supaya tidak banyak tutup maka peneliti merekomendasikan untuk menata ulang para pedagang yang ada disana. Para pedagang yang memang berjualan baju atau jam tangan bisa dikumpulkan di lantai dan tidak berjualan di lantai bawah. Lantai bawah

dikhususkan untuk para pedagang yang berjualan bahan makanan sehari-hari sehingga pembeli akan langsung naik ke lantai dua jika memang mencari pakaian atau jam tangan, tidak membeli di pedagang yang ada dibawah. Hal ini bisa membuat pedagang di lantai dua menjadi lebih ramai lagi karena memang pembeli akan khusus berbelanja di lantai dua.

Selain permasalahan pengelompokan pedagang di lantai dua, permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan kebersihan dan kerapihan yang ada di Pasar Mimbaan baru. Meskipun para pembeli adalah para pelanggan lama akan tetapi kebersihan dan kerapihan akan Pasar Mimbaan baru tetap harus diperhatikan untuk menjaring para pelanggan baru yang belum pernah ke Pasar Mimbaan baru terutama para wisatawan yang mampir kesana untuk berbelanja oleh-oleh. Kebersihan terutama adalah membuat saluran air dan membuat lantai yang bisa menyerap air yang ada jika hujan atau air pembuangan dari para pedagang. Jika saluran dan lantai sudah diperbaiki maka tidak akan ada lagi air yang menggenang dan mengakibatkan becek di Pasar Mimbaan baru. Terutama di lantai dua karena yang paling terkena dampaknya jika terkena hujan. Selain itu Disperindag juga bisa bekerjasama dengan dinas kebersihan untuk melakukan bersih-bersih di pasar tersebut setiap harinya termasuk membuang sampah yang ada. Sehingga pasar selalu terlihat bersih dan nyaman.

Selain kebersihan, kerapihan juga menjadi salah satu masalah yang bisa ditanggulangi oleh Disperindag di Pasar Mimbaan Baru. Kerapihan di pasar terutama adalah terkait dengan penataan barang-barang pedagang yang ada disana. Barang-barang tersebut seharusnya di jadikan satu dan diletakkan di gudang dan

tidak dibiarkan sembarangan bergeletakan di pasar terutama para pedagang yang berjualan di luar karena langsung terlihat dari jalan. Disperindag bisa menyediakan satu tempat khusus barang pedagang seperti wahana permainan sehingga mereka bisa menaruh wahana mainan disana. Disamping lebih aman juga terlihat lebih rapi bagi para pengunjung yang datang ke Pasar Mimbaan Baru.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Humanika, 2010.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Narbuko, Coli dan Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: 2005.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Gramedia Widiasarana, 2008
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sutedi, Andrian, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.



Usman, Husnani dan Setiadi Akbar, Purnomo, *Metodologi penelitian Sosial* ,  
Jakarta : Bumi Aksara, 2000.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: teori, proses, dan studi kasus*, Yogyakarta:  
Center of academic publishing service

### **Skripsi**

Batlajeri, Theodorus G J. 2016. *Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung*. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Komputer Indonesia.

Febrihanuddin, Rifki. 2017. *Evaluasi Kebijakan Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung.

Junaidy, Robby Kurniawan. 2014. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban dan Pembinaan Gelandang dan Pengemis di Kota Pekanbaru*. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.

Netti, Nelma. 2016. *Evaluasi Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi*. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.

**Produk Hukum**

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

**Website**

<https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf> , diakses pada tanggal 31 Juli 2018 pada pukul 13.30 WIB

<loketpeta.pu.go.id/peta-infrastruktur-kabupaten-situbondo-2014> , diakses pada tanggal 29 November 2018 pada pukul 15.00 WIB

<https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=197>, diakses pada tanggal 22 November 2018 pada pukul 19.00 WIB

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Bapak Salman selaku Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Pasar. Pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 pada pukul 08.00 WIB di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo

Hasil wawancara dengan Mas Pri selaku wartawan Radar Situbondo. Pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 pada pukul 09.00 WIB di kantor Radar Situbondo.

Hasil wawancara dengan Bapak Prima selaku Kepala Seksi Pengelolaan Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo, pada tanggal 14 November 2018 pada pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo.

Hasil wawancara dengan Bapak Juanidi selaku Kepala Pasar Mimbaan Baru, pada tanggal 8 November 2018 pukul 13.00 WIB di Kantor UPTD Pasar Mimbaan Baru.

Hasil wawancara dengan Ibu Sukiyah pedagang buah pisang di Pasar Mimbaan Baru. Wawancara dilakukan di kios Ibu Sukiyah pada tanggal 9 November 2018 pukul 14.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Ali selaku pedagang kerajinan bambu di Pasar Mimbaan Baru. Wawancara dilakukan di kios Bapak Ali pada tanggal 9 November 2018 pukul 15.10.WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Sukiyem selaku pedagang buah-buahan di Pasar Mimbaan Baru. Wawancara dilakukan di kios Ibu Sukiyem pada tanggal 9 November 2018 pukul 16.00 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Sudarsih sebagai pelanggan Pasar Mimbaan Baru. Wawancara dilakukan di Pasar Mimbaan Baru pada tanggal 21 November 2018 pada pukul 09.00 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Dini sebagai pelanggan Pasar Mimbaan Baru. Wawancara dilakukan di Pasar Mimbaan Baru pada tanggal 21 November 2018 pada pukul 09.30 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Suparno sebagai pelanggan Pasar Mimbaan Baru. Wawancara dilakukan di Pasar Mimbaan Baru pada tanggal 21 November 2018 pada pukul 10.30 WIB

